



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL**

PEMBIMBING

Ellya Susilowati, M.SI., PH.D

Versanudin Hekmatyar, S. KPm, M.Kesos

Oleh :

RANA FAIRUS AMNA

NRP : 20.03.065

**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM
LABORATORIUM PROGRAM STUDI
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama Mahasiswa : Rana Fairus Amna
NRP : 20.03.065
Program Studi : Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2



Ellya Susilowati, M.Si., PH.D



Versanudin Hekmatyar, S.KPm,
M.Kesos

Mengetahui :

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaansosial

Program Sarjana Terapan

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung



Lina Favourita, Ph.D

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiraat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta petunjuk dan kemudahan yang selalu diberikan oleh-Nya, sehingga praktikan diberikan kelancaran dalam menyelesaikan Laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial ini dengan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini tentu bukan karena buah kerja keras praktikan semata, melainkan tidak terlepas dari campur tangan pihak-pihak lain, oleh karena itu pada kesempatan ini praktikan menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini, diantaranya:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang sudah memberikan arahan dan masukan dalam kelancaran kegiatan Praktikum Laboratorium.
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
4. Ibu Ellya Susilowati, M.SI., PH.D dan Bapak Versanudin Hekmatyar, S. KPM, M.Kesos selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan baik secara keilmuan, pengetahuan, administrasi, dan dukungan dalam proses pelaksanaan praktikum;
5. Pihak Kelurahan Kebon Jayanti yang telah memberikan informasi dan dukungan serta fasilitas tempat praktikum laboratorium.
6. Rekan- rekan anggota kelompok 2 yang senantiasa memberikan motivasi selama pelaksanaan Praktikum Laboratorium.

Praktikan menyadari dalam pelaksanaan Praktikum Laboratorium dan penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran praktikan harapkan dari semua pihak dan semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi praktikan dan umumnya bagi pihak yang membaca.

Bandung, 16 April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3. Waktu dan Lokasi Praktikum	3
1.4. Proses Praktikum	4
1.5. Sistematika Laporan	7
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM	11
2.1. Profil Analisis Jaminan Sosial	11
2.2. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	22
2.3. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	38
2.4. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial	55
2.5. Profil Analisis Penanggulangan Bencana	67
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	84
3.1. Kesimpulan.....	84
3.2. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial	17
Tabel 2. Sistem Partisipasi dalam Kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial	18
Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial	19
Tabel 4. Analisis SWOT Profil Analisis Jaminan Sosial	20
Tabel 5. Tahap Pelaksanaan Program Analisis Jaminan Sosial.....	22
Tabel 6 Bentuk Kegiatan Program Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	32
Tabel 7. Sistem Partisipasi Kegiatan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	33
Tabel 8. Anggaran Biaya kegiatan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	34
Tabel 9. Analisis SWOT Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	35
Tabel 10. Sumber Dana Bantuan Sosial Tahap Pelaksanaan Kegiatan Profil Analisis.....	37
Tabel 11. Bentuk Kegiatan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	49
Tabel 12. Sistem Partisipasi Kegiatan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial.....	50
Tabel 13. Rencana Anggaran kegiatan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	51
Tabel 14. Analisis SWOT Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	52
Tabel 15. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	54
Tabel 16. Bentuk Kegiatan Program Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial	62
Tabel 17 Sistem Partisipasi Kegiatan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial	62
Tabel 18. Rencana Anggaran Kegiatan Profil Penataan Lingkungan	

.....	64
Tabel 19 Analisis SWOT Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial	65
Tabel 20. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Analisis Penataan Lingkungan Sosial	66
Tabel 21. Daftar usaha Home Industry di Kelurahan Kebon Jayanti	68
Tabel 22. Bentuk Kegiatan Profil Analisis Penanggulangan Bencana	77
Tabel 23. Sistem Partisipasi Program Analisis Penanggulangan Bencana.....	78
Tabel 24. Rencana Anggaran Program Profil Analisis Penanggulangan Bencan	79
Tabel 25. Analisis SWOT Profil Analisis Penanggulangan Bencana.....	80
Tabel 26. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Profil Penanggulangan.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Analisis Pohon Masalah profil analis jaminan sosial.....	15
Gambar 2.2	Analisis Pohon Masalah profil analis sumber dana bantuan sosial	28
Gambar 2.3	Analisis Pohon Masalah profil analis pemberdayaan sosial.....	45
Gambar 2.4	Analisis Pohon Masalah profil analis Penataan Lingkungan Sosial.....	59
Gambar 2.5	Analisis Pohon Masalah profil analis penanggulangan Bencana	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Polteksos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom Teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bag mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerja sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial praktikan mengambil isu masalah mengenai, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

Dalam pelaksanaan praktikum laboratorium, dilakukan di kelurahan Kebon Jayanti, Kabupaten Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam praktikum Laboratorium ini praktikan memilih isu yang berkaitan dengan profil lulusan. Pertama, Analisis Jaminan Sosial praktikan mengambil salah satu isu terkait mekanisme pelaksanaan aplikasi mobile JKN di Kelurahan Kebon Jayanti. Kedua Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan mengambil isu masalah terkait hambatan dalam melakukan graduasi mandiri, ketiga Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan mengambil isu masalah terkait ketidakmampuan para fakir miskin dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Keempat Analis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan mengambil isu masalah terkait padatnya pemukiman yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan kelima

Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan mengambil isu masalah terkait tidak adanya penerapan K3 dalam usaha *home industry*.

1.2 Tujuan dan manfaat praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan
2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
4. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - a) Pendekatan Awal
 - b) Asesmen
 - c) Perencanaan Intervensi

Adapun manfaat diadakannya praktikum ini yaitu :

1. Bagi Mahasiswa
 - a) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan

- b) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 - c) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 - d) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
 - e) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
 - f) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
 - 1) Pendekatan awal
 - 2) Asesmen
 - 3) Rencana Intervensi
2. Bagi Lembaga
- a. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
 - b. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

1.3. Lokasi dan Waktu Praktikum

Lokasi Praktikum Laboratorium dilaksanakan di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

- 1. Pra Lapangan
 - a. Pembekalan : 25 Januari- 3 Februari 2023
 - b. Pelepasan Praktikan : 3 Februari 2023
- 2. Lapangan (*Indoor*) : 6 Februari 2023-15 April 2023
- 3. Pasca Lapangan
 - a. Bimbingan Laporan : 16-26 April 2023
 - b. Pendaftaran Ujian : 27 – 29 April 2023
 - c. Ujian Lisan Praktikum : 1 – 2 Mei 2023
 - d. Perbaikan dan Penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

1.4. Proses Praktikan

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1.4.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Pembekalan Umum**

Pembekalan umum dilaksanakan untuk memberikan penjelasan terkait pedoman pelaksanaan Praktikum Laboratorium. Pemateri dalam pembekalan umum ini adalah Ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Kepala Prodi D-IV Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Ibu Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Ketua Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Pembekalan ini dihadiri oleh Mahasiswa Praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Semester VI dan Dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

2. **Bimbingan Pra Lapangan oleh Dosen Pembimbing Praktikum**

a. **Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom**

Sebelum melakukan Praktikum Laboratorium, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas yang terdiri dari materi metode dalam pekerjaan sosial, teknologi yang digunakan oleh pekerja sosial, dan permasalahan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.

b. **Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan**

c. **Melakukan praktik, demonstrasi, *role playing* tentang kegiatan dan teknologi perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :**

i. **Mengenal populasi kelompok sasaran (*population target group*) dan lingkungan sosialnya.**

ii. **Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana.**

iii. **Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.**

iv. **Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos**

3. Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum
Pelepasan praktikan dilakukan secara luring di Lapangan Poltekesos oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum dan dilanjutkan dengan pengantaran mahasiswa oleh dosen pembimbing ke lokasi praktikum yaitu Kelurahan Kebon Jayanti.

1.4.2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari dengan rician kegiatan sebagai berikut:

1. Analis Jaminan Sosial

Peningkatan kompetensi Analis Jaminan Sosial diberikan oleh Ibu Gayatri Wasitra Nirwesti, S.Mn, MSE secara luring di Auditorium Poltekesos yang dilaksanakan pada 2 Februari 2023. Dalam peningkatan kompetensi ini, dipaparkan materi mengenai :

- a. Kebijakan dan struktur jaminan sosial
- b. Tantangan program jaminan sosial di Indonesia
- c. Potensi kontribusi lulusan jaminan sosial

Pada pelaksanaannya, praktikan mencari isu terkait masalah yang berkaitan dengan program jaminan sosial yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti dengan mengadakan *community meeting* yang dihadiri oleh PKK Kelurahan Kebon Jayanti. Praktikan juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

2. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Peningkatan kompetensi Sumber Dana Bantuan Sosial diberikan oleh Bapak Tonton Heryanto secara luring di Auditorium Poltekesos yang dilaksanakan pada 22 Februari 2023.

Pada pelaksanaannya, praktikan mencari isu terkait masalah yang berkaitan dengan program sumber dana bantuan sosial yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

3. Analisis Pemberdayaan Sosial

Peningkatan kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial diberikan oleh Bapak Ade Reno Sudiarno, A.KS, MSW secara luring di Auditorium Poltekesos yang dilaksanakan pada 8 Maret 2023. Dalam peningkatan kompetensi ini, dipaparkan materi meliputi :

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Pendekatan pemberdayaan masyarakat
- c. Actor dalam program pemberdayaan
- d. Tahapan pemberdayaan
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan serta peran dan keterampilan pekerja sosial dalam pemberdayaan

Pada pelaksanaannya, praktikan mencari isu terkait masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial yang terdapat di Kelurahan Kebon Jayanti dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

4. Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Peningkatan kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial diberikan oleh Bapak Ade Reno Sudiarno, A.KS, MSW. Peningkatan kompetensi diberikan secara luring di Auditorium Poltekesos yang dilaksanakan pada 24 Maret 2023.

Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan Lingkungan Sosial, yang meliputi:

5. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana

Peningkatan kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana diberikan oleh Bapak Mohd. Robi Amri secara luring di Auditorium Poltekesos yang dilaksanakan pada 5 April 2023. Dalam peningkatan kompetensi ini, dipaparkan materi meliputi :

- a. Gambaran umum kondisi kebencanaan di Indonesia
- b. Peran masyarakat dan pihak terkait dalam upaya antisipasi bencana
- c. Kegiatan dan tantangan penanggulangan bencana
- d. Kompetensi yang harus dimiliki dan peran dalam upaya penanggulangan bencana

Pada pelaksanaannya, praktikan mencari isu terkait masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang terdapat di Kelurahan

Kebon Jayanti dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

1.4.3. Tahap Pasca Lapangan

- a. Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
- b. Ujian Lisan Praktikum
- c. Perbaikan dan penyerahan laporan

1.5. Sistematika Laporan

Pada akhir kegiatan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan akhir yang mencantumkan keseluruhan hasil kegiatan praktikum laboratorium dari awal hingga akhir kegiatan. Mahasiswa diwajibkan menyusun laporan akhir secara individu dengan sistematika laporan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Manfaat Praktikum
- C. Waktu dan Lokasi Praktikum
- D. Proses Praktikum
- E. Sistematika Laporan

II. PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1. Profil Analisis Jaminan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah
2. Tinjauan Konsep /Teori yang Relevan dengan Kasus/Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dipilih
3. Asesmen
 - a. Identifikasi Masalah
 - 1) Penyebab Masalah
 - 2) Dampak Masalah
 - 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama
 - b. Identifikasi Kebutuhan
 - c. Identifikasi Sumber dan Potensi
4. Rencana Intervensi
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Umum dan Khusus
 - c. Bentuk Kegiatan dan Program
 - d. Sistem Partisipasi
 - e. Metode dan Teknik
 - f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan
 - g. Analisis Kelayakan Program

- h. Jadwal dan Langkah- Langkah
- 2.2. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial
 - 1. Gambaran Umum Masalah
 - 2. Tinjauan Konsep /Teori yang Relevan dengan Kasus/Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dipilih
 - 3. Asesmen
 - a. Identifikasi Masalah
 - 1) Penyebab Masalah
 - 2) Dampak Masalah
 - 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama
 - b. Identifikasi Kebutuhan
 - c. Identifikasi Potensi dan Sumber
 - 4. Rencana Intervensi
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Umum dan Khusus
 - c. Bentuk Kegiatan dan Program
 - d. Sistem Partisipan
 - e. Metode dan Teknik
 - f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan
 - g. Analisis Kelayakan Program
 - h. Jadwal dan Langkah- Langkah
- 2.3. Profil Analis Pemberdayaan Sosial
 - 1. Gambaran Umum Masalah
 - 2. Tinjauan Konsep /Teori yang Relevan dengan Kasus/Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dipilih
 - 3. Asesmen
 - a. Identifikasi Masalah
 - 1) Penyebab Masalah
 - 2) Dampak Masalah
 - 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama
 - b. Identifikasi Kebutuhan
 - c. Identifikasi Potensi dan Sumber
 - 4. Rencana Intervensi
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Umum dan Khusus
 - c. Bentuk Kegiatan dan Program
 - d. Sistem Partisipan
 - e. Metode Teknik
 - f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan
 - g. Analisis Kelayakan Program

- h. Jadwal dan Langkah-Langkah
- 2.4. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial
1. Gambaran Umum Masalah
 2. Tinjauan Konsep /Teori yang Relevan dengan Kasus/Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dipilih
 3. Asesmen
 - a. Identifikasi Masalah
 - 1) Penyebab Masalah
 - 2) Dampak Masalah
 - 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama
 - d. Identifikasi Kebutuhan
 - e. Identifikasi Potensi dan Sumber
 - 2) Rencana Intervensi
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Umum dan Khusus
 - c. Bentuk Kegiatan dan Program
 - d. Sistem Partisipan
 - e. Metode Teknik
 - f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan
 - g. Analisis Kelayakan Program
 - h. Jadwal dan Langkah-Langkah
- 2.5. Profil Analisis Penanggulangan Bencana
1. Gambaran Umum Masalah
 2. Tinjauan Konsep /Teori yang Relevan dengan Kasus/Masalah Kesejahteraan Sosial yang Dipilih
 3. Asesmen
 - a. Identifikasi Masalah
 - 1) Penyebab Masalah
 - 2) Dampak Masalah
 - 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama
 - b. Identifikasi Kebutuhan
 - c. Identifikasi Potensi dan Sumber
 4. Rencana Intervensi
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan Umum dan Khusus
 - c. Bentuk Kegiatan dan Program
 - d. Sistem Partisipan
 - e. Metode dan Teknik
 - f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan
 - g. Jadwal dan Langkah- Langkah

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

3.2. Rekomendasi

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
2. Politeknik Kesejahteraan Sosial

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Profil Analisis Jaminan Sosial

2.1.1. Gambaran Umum Masalah

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004. Pasal 1 angka 2 UU SJSN memberi pengertian atas sistem jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara program Jaminan Sosial.

Badan penyelenggara jaminan sosial ini adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Melalui badan penyelenggara ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau kurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, hilangnya pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pension.

Dalam pelaksanaan jaminan sosial yang ada di Kelurahan Kebon Jayanti memiliki beberapa permasalahan dari program-program jaminan sosial yang ada seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Sosial yang berasal dari masyarakat itu sendiri atau biasa disebut jaminan sosial masyarakat.

2.1.2. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih.

a. Jaminan Sosial.

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan untuk menjamin agar seluruh rakyat mendapat kebutuhan dasar yang layak. Jaminan sosial masuk dalam deklarasi hak asasi manusia universal tahun 1948 yang berarti negara berkewajiban menyelenggarakan jaminan sosial kepada warganya.

b. Jaminan Kesehatan Nasional JKN-KIS .

Diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat Jaminan Kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

c. Jenis kepesertaan JKN-KIS

- a) Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), merupakan program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.
- b) Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terdiri dari :
 - 1. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah orang yang bekerja pada setiap pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari PPU Penyelenggara Negara
 - 2. PPU Non Penyelenggara Negara terdiri dari pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta
- c) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri dan pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang mampu membayar iuran, antara lain terdiri dari : Notaris, Pengacara, Akuntan, Konsultan Dokter/Bidan, Pedagang/Penyedia Jasa, Petani/Peternak, Nelayan, Supir, Ojel, Montur dan lain sebagainya.
- d) Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh pemerintah Pusat/Daerah, PPU serta PBPU, yang terdiri dari : BP Penyelenggara Negara dan BP Non Penyelenggara Negara.
 - 1. BP Penyelenggara Negara terdiri dari Penerima Pensiun (PP) Pejabat Negara PP PNS Pusat /Daerah, PP TNI, PP PORI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
 - 2. BP Non Penyelenggara Negara terdiri dari Investor, Pemberi Kerja dan BP lain yang mampu membayar iuran.
- e) Aplikasi Mobile JKN

Aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi untuk kemudahan calon peserta atau peserta JKN-KIS, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN di Google Playstore atau Apps Store. Di dalam Aplikasi Mobile JKN juga terdapat fitur kartu peserta berupa KIS Digital yang dapat digunakan sebagai identitas peserta pada saat akan menggunakan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Selain itu terdapat fitur artikel untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan, serta fitur FAQ berupa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta lengkap dengan penjelasannya.

2.1.3. Asesmen

Teknik Asesmen pada Profil Jaminan Sosial yang digunakan oleh praktikan di Kelurahan Kebon Jayanti adalah *Community Meeting* dan wawancara. Dalam *Community Meeting* yang dilakukan bersama ibu-ibu kader PKK praktikan menemukan isu masalah terkait jaminan sosial dan jaminan sosial berbasis masyarakat. Isu masalah yang berkaitan dengan jaminan sosial praktikan menemukan isu masalah terkait mekanisme pelaksanaan Mobile JKN dan mekanisme JKN KIS di Kelurahan Kebon Jayanti. Dalam teknik wawancara yang dilakukan pratikum memperoleh informasi terkait mekanisme pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kelurahan Kebon Jayanti.

1. Identifikasi Masalah

Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi merupakan salah satu gerakan inovasi pelayanan public dalam rangka mereformasi birokrasi di ranah pemerintah Indonesia. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah pelayanan dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Namun dalam pelaksanaannya pelayanan kesehatan berbasis teknologi ini memiliki kendala yaitu banyak masyarakat yang kurang memahami terkait mekanisme pelaksanaannya, banyak masyarakat yang merasa acuh terhadap pelayanan kesehatan berbasis teknologi, selain itu masih banyak masyarakat yang tidak, dan tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh kader BPJS Kesehatan.

Setelah melakukan *Community Meeting* bersama para kader PKK ditemukan beberapa isu masalah dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut :

1. Tunggakan BPJS yang diakibatkan oleh ketika awal pelaksanaan program BPJS Kesehatan para warga mendaftarkan dirinya sebagai peserta Non PBI namun karena kurangnya pemahaman warga mengenai adanya iuran yang harus dibayarkan dan dampak dari pandemic COVID 19 yang berdampak pada perekonomian warga yang tidak stabil saat pandemic.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait sosialisasi program JKN-KIS. Hal ini sering terjadi dimana saat diadakan sosialisasi baik itu secara langsung melalui pertemuan warga dan memanggil narasumber dari tenaga BPJS Kesehatan maupun sosialisasi melalui pesan-pesan yang dikirimkan oleh kader BPJS Kesehatan ini tidak di perhatikan oleh masyarakat.
3. Mayoritas masyarakat belum memahami mengenai aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan seperti aplikasi Mobile JKN dan salah satu web yaitu Pandawa. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan akses terkait penggunaan *hanphone-hanphone* yang digunakan oleh warga setempat.

a) Penyebab Masalah

- a. Kurang optimalnya pemanfaatan Mobile JKN.

Kurang optimalnya pemanfaatan mobile JKN ini dapat dilihat dari penggunaan mobile JKN ini yang dapat dipergunakan untuk melakukan pendaftaran, memperoleh informasi terkait status kepesertaan dan informasi faskes yang dapat diakses.

- b. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

Kurang keterampilan dan pemahaman ini berkaitan dengan penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Mobile JKN hal ini dikarenakan kurangnya optimalnya pelaksanaan sosialisasi Mobile JKN di Kelurahan Kebon Jayanti.

- c. Kurangnya kesadaran untuk mengakses Aplikasi Mobile JKN.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses aplikasi Mobile JKN hal ini dikarenakan masyarakat mengabaikan manfaat dari aplikasi yang dapat mempermudah mereka. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa penggunaan JKN KIS saat sakit saja dan mereka tidak mengetahui apakah mereka masih menjadi peserta atau tidak.

b) Dampak Masalah

- a. Ketidaktahuan penerima manfaat JKN tentang Aplikasi Mobile JKN yang dapat membantu dalam akses informasi JKN.

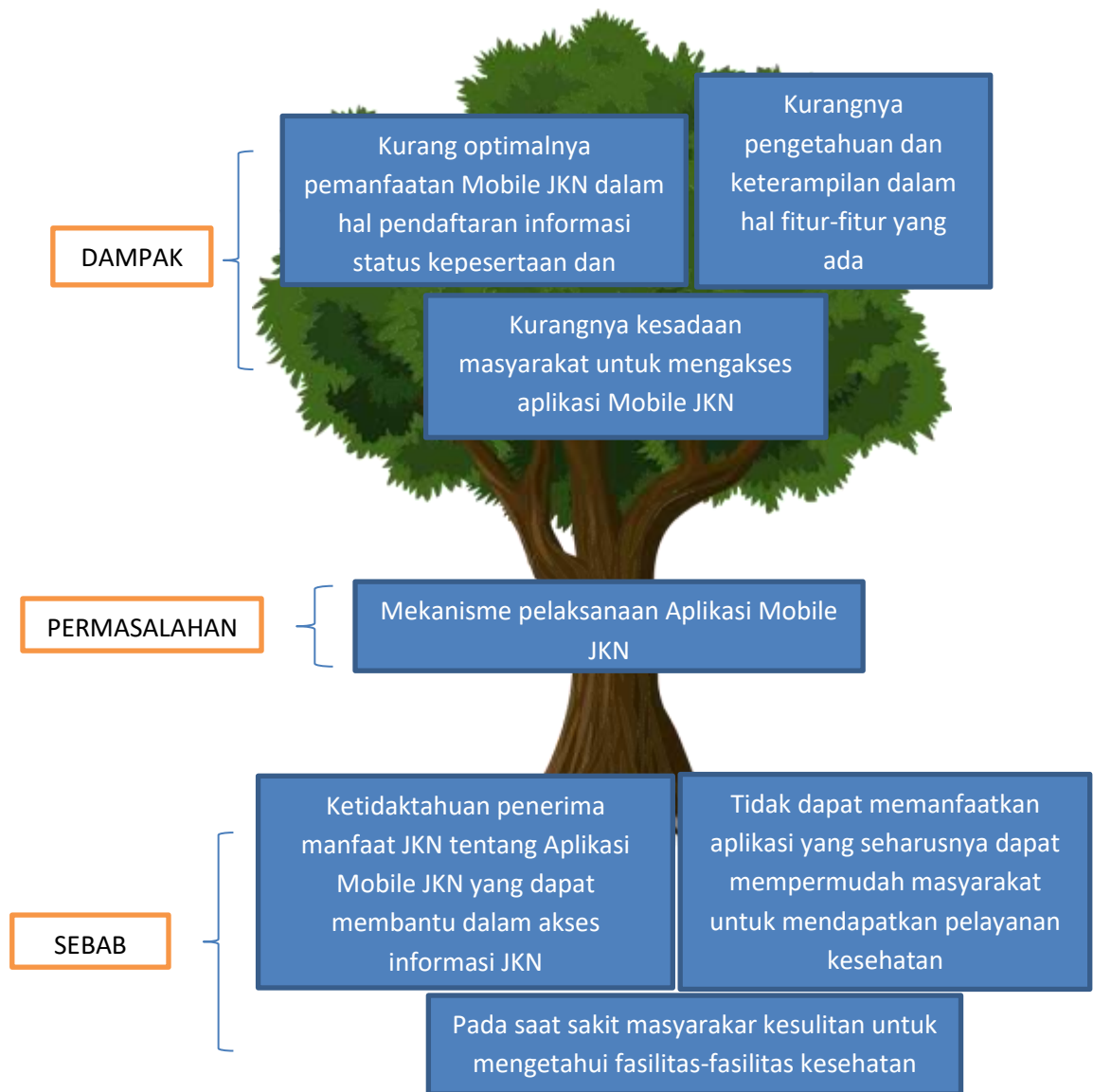
Ketidaktahuan ini disebabkan oleh sikap masyarakat yang mengabaikan sosialisasi yang telah dilakukan oleh kader BPJS. Selain itu masyarakat juga mengabaikan penyebaran-penyebaran informasi yang dilakukan terkait mobile JKN.

- b. Tidak dapat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN

Aplikasi Mobile JKN ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan JKN KIS di Indonesia. Maka dari itu sebagai sebuah aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ini seharusnya aplikasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat.

- c. Pada saat sakit masyarakat kesulitan untuk mengetahui fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat.

Salah satu kemudahan yang diperoleh dari penggunaan Aplikasi ini adalah, masyarakat dapat melihat status kepesertaannya dengan fitur yang telah disediakan dalam Aplikasi Mobile JKN ini.



Gambar 1. Pohon Masalah profil analisis jaminan sosial

c) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang terdiri dari RW 08, 05, 01,07,13, dan RW 04 yang disetiap RW dilakukan wawancara sebanyak 3 sampai 5 orang , asasmen yang telah dilakukan di Kelurahan Kebon Jayanti maka masalah yang dianggap menjadi prioritas adalah ketidakpahaman masyarakat mengenai penggunaan aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah akses pelayanan-pelayanan dari BPJS Kesehatan.

2. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah yang dipilih kebutuhan yang diperlukan yang sesuai dengan permasalahan yang ada adalah :

1. Memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan dari BPJS Kesehatan.
2. Memberikan pemahaman terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk menuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. *Alan Pincus* dan *Minahan* (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga :

1) Sumber Informal

Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informal, dan pelayanan konkrit. Sistem informal yang dimanfaatkan yaitu pihak RT dan RW.

2) Sumber formal

Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi informal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber formal yang dapat dimanfaatkan yaitu BPJS Kesehatan Kabupaten Bandung. BPJS Kesehatan berperan sebagai *educator* bagi masyarakat yang menjadi peserta JKN KIS.

3) Sistem kemasyarakatan

Sistem sumber berupa rumah sakit, badan adopsi, program latihan kerja, dan pelayanan. Sistem kemasyarakatan dapat dimanfaatkan yaitu pihak Kelurahan, Puskesmas, dan karang taruna.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Bentuk jaminan sosial berupa jaminan kesehatan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Jaminan Kesehatan dipergunakan untuk menjamin kesehatan dalam mengakses fasilitas kesehatan bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat mendapatkan hak untuk memperoleh jaminan kesehatan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk memperoleh pelayanan kesehatan tersebut. Maka dari itu perlu diadakan sosialisasi terkait

aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan lesehatan ini. Sosialisasi yang akan diadakan terkait dengan penggunaan aplikasi Mobile JKN.

b. Tujuan umum dan khusus

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Program Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aplikasi Mobile JKN.

2. Tujuan Khusus

- a. Masyarakat mampu mengoperasikan Aplikasi Mobile JKN
- b. Masyarakat mampu memberikan contoh penggunaan Aplikasi Mobile JKN

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Berdasarkan fokus masalah yang telah ditetapkan maka dapat dirumuskan bentuk kegiatan untuk Program Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile. Dalam pelatihan ini akan mempraktikkan langsung penggunaan aplikasi Mobile JKN dan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di dalmnya. Setelah melakukan pelatihan langkah selanjutnya adalah penyerluasan informasi terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Indicator Keberhasilan
Pelatihan	Warga Kelurahan Kebon Jayanti	Peningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terjait aplikasi mobile JKN	BPJS Ketenagakerjaan	Kepala Kelurahan Babakan Surabaya	1 hari	Meningkatya kemampuan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat pihak-pihak terkait dalam program Pelatihan yang akan dilakukan. Dalam sistem partisipasi ini terdiri dari *inisiator system, chage agent system, support system, controlling system, implementing system, target system, dan asction system*. Berikut tabel yang dapat dilihat dari system partisipasi :

Tabel 2. Sistem Partisipasi dalam kegiatan Profil Analisis Jaminan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pekerja Sosial
2.	<i>Chage Agent System</i>	Pekerja Sosial
3.	<i>Client System</i>	Warga Kelurahan Kebon Jayanti
4.	<i>Support System</i>	Ketuan RT dan RW, Kelurahan Kebon Jayanti, Puskesmas, kader BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan
5.	<i>Contrilling System</i>	Direktor Jendral Kesehatan
6.	<i>Implementing system</i>	Ketua RT dan RW. Pemerintah Kelurahan Kebon Jayanti, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
7.	<i>Target System</i>	Warga Kelurahan Kebon Jayanti
8.	<i>Action System</i>	Pekerja Sosial, Puskesmas, dan Kader BPJS Kesehatan

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah pengembangan masyarakat (*Community Development*)/Pengembangan Organisasi (*Community Organiation*). CO/CD adalah salah satu metode yang digunakan dalam praktik pekerja sosial dengan fokus utama adalah level komunitas atau masyarakat lebih luas. CO/CD juga dimaksud untuk proses memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial ddengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyakat atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Adapun teknik yang digunakan *Capacity building* yang dapat diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Dalam pelaksanaan Program Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN ini memerlukan anggaran dana untuk pelaksanaannya. Maka dari itu berikut acuan dasar dana dalam pelaksanaan Program Pelatihan Penggunaan Mobile JKN ini :

Tabel 3. Rencana Anggtan Biaya kegiatan Profil Analis Jaminan Sosial

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Logistik					
1.	Benner Kegiatan Sosialisasi	1	Lembar	100.000,00	100.000,00
2.	ATK	5	Paket	10.000,00	50.000,00
Jumlah					150.000,00
Honor					
1.	BPJS Kesehatan	1	1	600.000,00	600.000,00
Jumlah					600.000,00
Konsumsi					
1.	Snack Panitia	5	Box	10.000,00	50.000,00
2.	Snack Tamu Undangan	15	Box	10.000,00	150.000,00
3.	Snack Peserta	40	Box	10.000,00	400.000,00
Jumlah					1.200.000,00
Jumlah keseluruhan					1.950.000,00

Alat dan bahan

1. Meja
2. Kursi
3. Laptop
4. *Banner*
5. Proyektor
6. Alat tulis
7. *Sound system*

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan sebuah teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*). Analisis SWOT Program “Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN” dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Analisis SWOT profil Analisis Jaminan Sosial

<p>Faktor internal</p> <p>Faktor eksternal</p>	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudahan memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan terdekat 2. Mampu menyelesaikan masalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait Aplikasi Mobile JKN 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>) :</p> <p>Terdapat masyarakat yang kurang memahami materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan yang akan diadakan</p>
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya materi dan narasumber dari pihak BPJS Kesehatan 2. Narasumber yang diundang sesuai 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama antara panitia penyelenggaraan penyuluhan dan narasumber yang diundang 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan sasaran secara lebih rinci dengan membatasi dalam lingkup para masyarakat yang masih produktif

3. Memperoleh dukungan dari pihak kelurahan dan pihak BPJS Kesehatan	2. Memanfaatkan media yang tersedia untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan oemahaman masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan Mobile JKN	
Ancaman (<i>Threaats</i>) : Tidak hadirnya masyarakat dalam program pelatihan yang akan dilakukan	Strategi ST : Membuat materi dan selebaran yang menarik perhatian sasaran sengan menggunakan pendekatan yang lebih modern seperti poster-poster yang menarik perhatian masyakat hal ini dapat mengundang perhatian masyarakat	Strategi WT : Meningkatkan sosialisasi melalui media-media yang tersedia terkait aplikasi Mobile JKN

Berdasarkan hasil analisis kelayakan Program “Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN” dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak apabila dibandingkan dengan aspek kelemahan.

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah dan pelaksanaan kegiatan bertujuan agar jalannya acara menjadi lancar dan berjalan dengan sistematis agar tercapainya tujuan program. Adapun langkah dan pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Tahap pra kegiatan

- a) Membentuk panitia kerja dan melakukan rapat terkait pelaksanaan program yang meliputi konsep dari penyuluhan yang akan di adakan,

menyusun jadwal kegiatan, dan menentukan narasumber yang akan menjadi pembicara.

- b) Menyusun proposal kegiatan
- c) Mengurus izin kegiatan dan menyebarkan undangan kepada narasumber serta peserta kegiatan

2. Tahap pelaksanaan

Susunan acara dalam Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai berikut :

Tabel 5. Tahap Pelaksanaan Program Profil Analis Jaminan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
1.	09.00-09.30	Registrasi Peserta	Divisi Acara	Divisi Acara
2.	09.30-09.45	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3.	09.45-10.00	Sambutan Lurah	Lurah	Divisi Acara
4.	10.00-10.45	Pemaparan Materi terkait Aplikasi Mobile JKN	Pihak BPJS Kesehatan	Divisi Acara dan Humas
5.	10.45-11.05	Penggunaan Aplikasi Mobile JKN	Kader BPJS dan Pihak BPJS Kesehatan	Divisi Acara dan Humas
6.	11.05-11.15	Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
7.	11.15-11.30	Penutup	MC	Divisi Acara

3. Tahap Pengakhiran

Pada tahanan ini, praktikan dan tim kerja melakukan evaluasi mengenai program yang telah berakhir. Evaluasi yang dilakukan adalah menyebarkan angket kepada peserta setelah penyuluhan berakhir dan menyebarkan brosur kepada peserta yang telah hadir, dan membuat laporan pertanggung jawaban mengenai penyuluhan. Terakhir adalah melakukan pembubaran panitia.

2.2. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

2.2.1 Gambaran Umum Masalah

Program Keluarga Harapan atau di singkat PKH adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Program ini dibentuk pada tahun 2017 melalui Kementrian Sosial. Pelaksanaan Program PKH ini ada yang berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) PKH. karakteristik PKH sebagai program bantuan sosial besyarat yaitu, membuka akses keluarga miskin dengan komponen ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lansia dan disabilitas berat. Manfaat yang diperoleh KPM dalam Program PKH adalah fasilitas kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar (PAUD) hingga pendidikan atas (SMA/Sederajat) yang tersedia di sekitar mereka. Selain itu KPM juga difasilitasi akses terhadap gizi, perawatan, pendampingan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya sebagai program komplementer PKH secara berkelanjutan.

Wilayah Kelurahan Kebon Jayanti memiliki 14 RW dengan jumlah KPM sebanyak 253 KPM. Untuk pendamping PKH di Kelurahan Kebon Jayanti hanya ada dua orang. Tolak ukur keberhasilan program PKH ini adalah mampu menggradiasi KPM yang sudah dianggap mapan hal ini dilihat dari kesanggupan KPM dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan upah yang diperoleh setiap bulannya. Graduasi sendiri dapat diartikan keluarnya kepesertaan KPM dari Program PKH. Graduasi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu alamian dan mandiri. Graduasi alamian adalah jika dalam satu keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tidak memiliki empat komponen yang sudah ditetapkan maka secara otomatis mereka graduasi mandiri. Sedangkan graduasi mandiri dapat diartikan dimana seseorang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dilihat dari gaji yang di peroleh dan keinginan KPM untuk menerima bantuan PKH lagi, proses graduasi ini bergantung pada kesadaran diri KPM itu sendiri. Ketentuan Dalam graduasi ini setiap pendamping harus menggradiasi minimal 10% dari jumlah dampingannya.

Dalam pelaksanaannya program PKH di Kelurahan Kebon Jayanti dapat dikatakan cukup optimal menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Namun program ini juga memiliki kendala-kendala. Setelah melakukan wawancara bersama pihak Kelurahan dan Pendamping PKH ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program PKH di Kelurahan Kebon Jayanti. Untuk fokus masalah yang diambil oleh penulis seperti sulitnya melakukan graduasi mandiri terhadap KPM yang dianggap sudah mampu.

2.2.2. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih.

a) Konsep Program PKH

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang dapat disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin

terutama ibu hamil dan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup peyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacitra Presiden RI .

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) diadakan sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

2. Tujuan program PKH

Tujuan umum PKH yaitu :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Tujuan khusus PKH, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan RTM/KSM
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM

Selain tujuan umum dan khusus terdapat juga tujuan dari Program Keluarga Harapan yaitu :

- a. Taraf Hidup, meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses kepada masyarakat miskin seperti ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lansia dan disabilitas agar memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang ada di sekitar lingkungan masyarakat.
- b. Mengurangi beban, keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mengakses sistem siber yang lainnya. Sehingga dapat mengurangi pengeluaran dari gaji yang dipapap dan meningkatkan pendapatan keluarga.
- c. Perubahan perilaku, tujuan dengan diberikannya program keluarga harapan ini adalah untuk melatih kemandirian masyarakat dan dapat memanfaatkan sistem sumber yang ada. Pada umumnya sistem sumber yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kesehatan dan Pendidikan.
- d. Mengurangi kemiskinan, dengan menerima bantuan PKH maka masyarakat dapat memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

e. Inklusi keuangan yaitu mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) nomor 76/POJK.07/2016 mengenai inklusi keuangan, adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk berupa layanan jasa keuangan dan lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Komponen Program PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut :

a. Komponen kesehatan kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Ibu Hamil/nifas/menyusui. Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan atau berada dalam masa menyusui.
- 2) Anak Usia Dini. Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung daei ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

b. Komponen Pendidikan Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah Anak usia yang dimaksud adalah seseorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

- 1) Komponen Kesejahteraan Sosial Kriteria penerima PKH komponen Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
- 2) Lanjut usia Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.
- 3) Penyandang disabilitas berat, penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu hidup sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

4. Kriteria Penerima Program PKH

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (PTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

b) Konsep Graduasi PKH

Merujuk pada Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi ialah berakhirnya masa kepesertaan KPM PKH, meskipun program PKH sendiri masih berlangsung.

1. Jenis Graduasi

Graduasi sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) Graduasi alamiah. Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan seorang KPM. Graduasi alamiah dapat terjadi apabila KPM sudah tidak memiliki pengurus kepesertaan. Selain itu graduasi alamiah ini juga terjadi karena seorang KPM tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan : kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial
- 2) Graduasi Sejahtera Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomo yang sudah meningkatkan dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapat bantuan sosial PKH. Graduasi Sejahtera Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari pendamping sosial atau pihak lainnya. Graduasi mandiri Sejahtera ini dapat terjadi apabila :
 - KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain.
 - KPM mengalami perubahan status menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, memiliki usaha atau kegoatan ekonomi yang berjalan sukses, dan atau memperoleh harga kekayaan tertentu.

2. Tujuan Graduasi

Graduasi ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

- a) Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH
- b) Memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat Sasaran
- c) Meminimalisis timbulnya kesenjangan sosial
- d) Mewujudkan rasa keadilan sosial

3. Teknik Graduasi

Teknik-teknik yang dapat dilakukan oleh pendamping PKH saat melakukan graduasi yaitu studi dokumentasi dengan memanfaatkan dta kepesertaan KPM PKH seperti foto kondisi rumah KPM, jumlah pendapatan berita acara hasil musyawarah desa / kelurahan, hasil

rembug. MPA dapat dijadikan dasar dalam melakukan graduasi kemudian beberapa surat yang dikeluarkan oleh desa atau dinas sosial juga dapat menjadi salah satu teknik graduasi.

2.2.3. Asesmen

Dalam proses asesmen untuk Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial yang dilakukan di Kelurahan Kebon Jayanti praktikan menggunakan teknik wawancara. Dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan pendamping PKH, Kasi Kesos, dan Bapak Lurah, praktikan menemukan isu masalah terkait hambatan dalam melakukan graduasi sejahtera terhadap keluarga KPM yang sudah mapan. Selain memperoleh isu masalah terkait hambatan dalam melakukan graduasi sejahtera kepada keluarga KPM yang sudah mapan, praktikan juga memperoleh gambaran mengenai penyebab dari isu masalah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Kelurahan Kebon Jayanti dan pendamping PKH Kecamatan Kiara Condong. Identifikasi masalah dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial PKH yaitu sulitnya melakukan.

1. Graduasi Mandiri kepada KPM.

Dalam pelaksanaan program PKH di Kelurahan Kebon Jayanti permasalahan yang dialami salah satunya adalah sulitnya melakukan graduasi mandiri kepada KPM yang sudah dapat dikatakan mampu, hal ini dikarenakan kurang kesadaran diri KPM terkait perubahan status perekonomiannya.

2. Ketergantungan dengan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

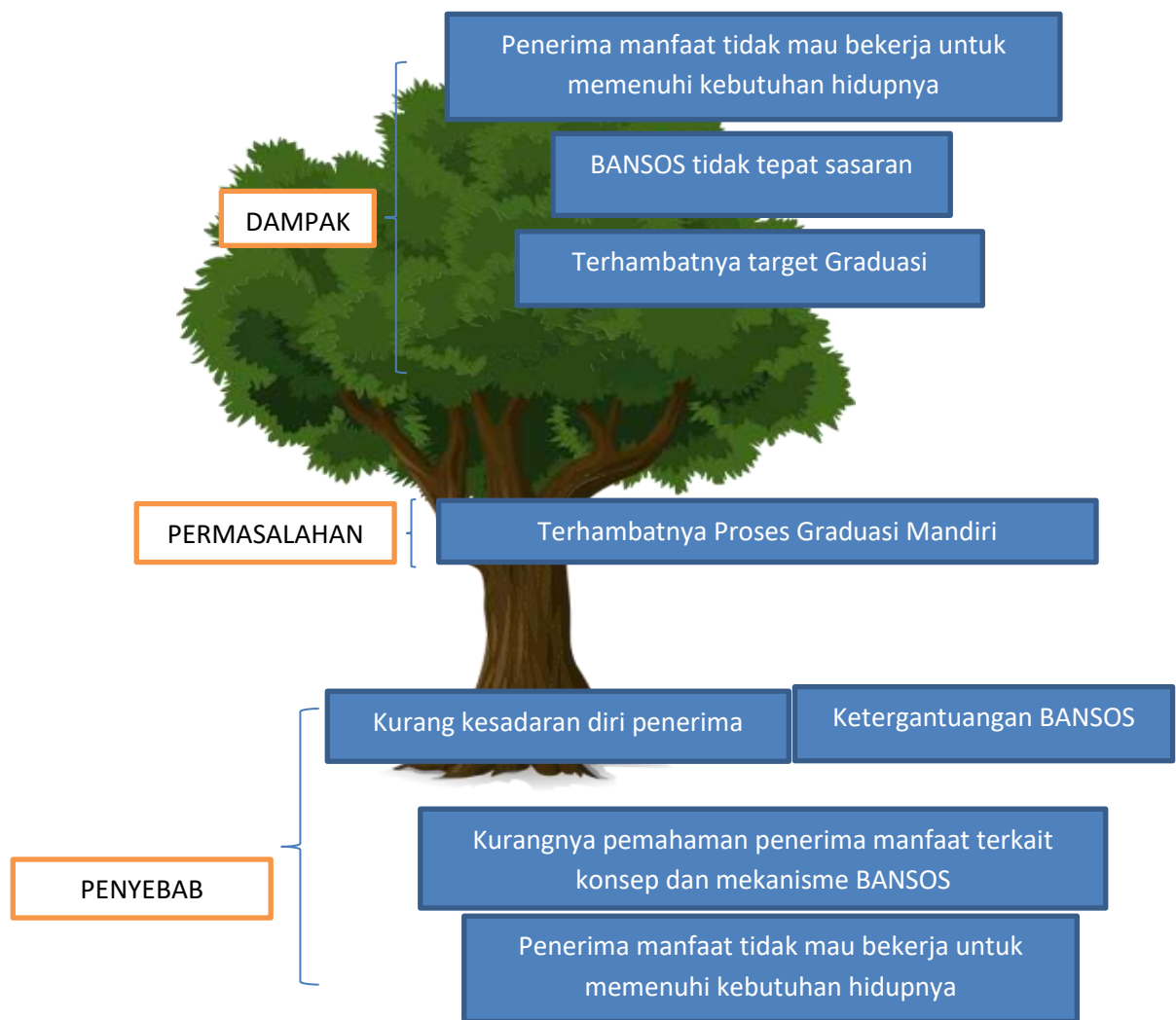
Ketergantungan ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep dari bantuan sosial itu sendiri, dimana konsep bantuan sosial ini diberikan secara selektif dan tidak terus menerus.

3. Pengelolaan dana bantuan Sosial PKH tidak sesuai kebutuhan.

Identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan terdapat beberapa KPM yang masih menggunakan bantuan sosial PKH yang diperuntukan untuk kebutuhan lain. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan dana bantuan sosial PKH ini diperuntukan untuk kebutuhan anak sekolah, ibu hamil dan komponen-komponen lain di dalam syarat kepersetaan PKH. Pengelolaan dana bantuan sosial yang diberikan kepada oleh pemerintah masih sangat memerlukan pengawasan hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang menggunakan dana bantuan sosial untuk kebutuhan lainnya seperti untuk membayar hutang dan lain sebagainya.

4. Kartu Zonk.

Identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program PKH yaitu terdapat kartu Zonk. Kartu zonksalah satu penyebabnya adalah hilangnya komponen penerima bantuan PKH, hilangnya komponen ini dapat disebabkan dari komponen penerima sudah meninggal dunia atau bagi KPM yang mempunyai komponen anak sekolah, anak sekolah tersebut sudah tamat sekolah atau tidak bersekolah lagi.



Gambar 2. Pohon Masalah analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

a) **Penyebab Masalah**

- a. Ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Dengan banyaknya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah mulai dari PKH, BPNT dan lain-lain menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan, anggapan masyarakat bahwa jika tidak bekerja juga akan mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Anggapan dari dari masyarakat inilah yang menjadikan masyarakat malas bekerja dan hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja.

- b. Kurangnya pemahaman penerima manfaat terkait konsep dari bantuan sosial dan mekanisme pelaksanaan program PKH.

Kurangnya pemahaman KPM terkait konsep dari program PKH inilah yang menjadikan hambatan dalam melakukan graduasi sejahtera kepada KPM. Hal yang menjadikan alasan mengapa KPM yang sudah sejahtera tidak ingin digraduasi adalah kurangnya pemahaman KPM terkait konsep dari program PKH ini dimana setiap KPM yang sudah sejahtera wajib melakukan graduasi hal ini dikarenakan setiap bantuan sosial yang diberikan harus tepat sasaran dan penerima manfaat juga dipilih secara selektif.

- c. Kurangnya kesadaran diri penerima manfaat terkait peningkatan perekonomian penerima manfaat.

Kurangnya kesadaran diri KPM ini adalah faktor terhambatnya graduasi sejahtera yang dilakukan, hal ini dikarenakan masih banyak KPM yang beranggapan bahwa bantuan sosial ini merupakan haknya meskipun KPM sudah dapat dikatakan mampu atau sejahtera.

b) Dampak Masalah

- a. Menjadikan penerima manfaat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dampak dari ketergantungan terhadap bantuan sosial ini salah satunya adalah menjadikan masyarakat penerima bantuan tidak mau bekerja hal ini dikarenakan mereka sudah diberikan mereka menggap bahwa kebutuhan mereka sudah terpenuhi dari bantuan sosial yang diberikan.

- b. Terhambatnya target dari pendamping PKH yaitu setiap pendamping harus menggraduasi 10 % dari jumlah dampingan.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang menjadikan keberhasilan dari program ini adalah pendamping PKH dapat menggraduasi 10% dari jumlah dampingannya.

- c. Menghambat salah satu tujuan dari program PKH yaitu memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Salah satu tujuan dari PKH adalah memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Hambatan dalam melakukan graduasi ini dapat

menjadikan bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dikarenakan syarat dari graduasi ini adalah KPM dikatakan sudah mapan.

c) **Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama**

Program Keluarga Harapan yang dapat disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam pelaksanaannya bantuan Sosial PKH ini mengalami masalah dalam melakukan graduasi mandiri kepada KPM yang sudah dapat dikatakan mampu, hal ini dikarenakan kurang kesadaran diri KPM terkait perubahan status perekonomian keluarganya, penerima manfaat juga masih ketergantungan dengan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, selain itu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait konsep dan mekanisme pelaksanaan dari bantuan sosial itu sendiri, dimana konsep bantuan sosial ini diberikan secara selektif dan tidak terus menerus. Selanjutnya dalam isu masalahnya sulitnya melakukan graduasi mandiri ini juga akan menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selain beberapa hal yang disampaikan diatas masalah sulitnya melakukan graduasi mandiri ini juga berkaitan dengan tidak terwujudnya salah satu tujuan dari graduasi yaitu memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

2. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan prioritas masalah pelaksanaan program PKH di Kelurahan Kebon Jayanti, sulitnya melakukan graduasi mandiri kepada KPM PKH dikarenakan mereka merasa ketergantungan dengan program bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah selain itu kurangnya kesadaran diri dari masyarakat terkait bantuan PKH ini yang tidak didapatkan terus menerus. Maka dari itu masyarakat membutuhkan sosialisasi terkait mekanisme pelaksanaan dari program PKH dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait Graduasi alamian dan mandiri. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah oemahaman KPM terkait tujuan dari program PKH serta meningkatkan kesadaran PKM terkait peningkatan perekonomian keluarga.

3. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berdasarkan identidikasi prioritas masalah diatas maka dapat ditentukan identifikasi potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam upaya penyelesaian masalah ini adalah :

- 1) Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjasama yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan.

2) Pihak Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia setelah Kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintah terkecil setingkat desa. Berbeda dengan desa kelurahan memiliki hal mengatur wilayahnya lebih terbatas.

3) Ketua RW dan RT

Rukun Warga atau disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. Sedangkan RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa kepala keluarga atau KK di setiap Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua.

2.2.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Indonesia melaksanakan salah satu Program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program yang dijalankan sebagai pelaksanaan dari peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin agar lebih terencana dan terarah. Sasaran dari program ini adalah keluarga miskin rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan hasil asamen yang telah dilakukan oleh praktikan terdapat permasalahan yaitu sulitnya melakukan graduasi mandiri kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu, penyebab dari masalah ini adalah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial dan kurangnya kesadaran diri masyarakat mengenai perubahan perekonomian keluarganya. Data penerima program PKH dari 14 RW di Kelurahan Kebon Jayanti keseluruhannya sebanyak 253 KPM.

Untuk upaya penyelesaian permasalahan ini terdapat beberapa potensi dan sumber yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu pendamping PKH, pihak RT dan RW yang didalamnya terdapat kelompok Karang Taruna, kelompok PKK yang berperan sebagai penggerak dan mengkoordinasi warga. Potensi yang dimiliki tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsep dari bantuan sosial dan mekanisme pelaksanaan PKH. Berdasarkan sistem sumber yang ada, maka

rencana intervensi yang dapat dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan KPM dan sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan program PKH dengan metode *Community Organization* dan menggunakan teknik penyuluhan dan *community meeting*.

b. Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Program Sosialisasi terkait Konsep dari Graduasi Dalam Program PKH ini memiliki tujuan umum yaitu untuk peningkatan pemahaman KPM terkait konsep dari graduasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Tujuan Khusus

Berikut tujuan khusus diadakanya kegiatan ini yaitu :

- 1) KPM mengetahui pengertian dari graduasi dalam program PKH
- 2) KPM mengetahui tujuan dari graduasi dalam program PKH
- 3) Meningkatkan kesadaran KPM terkait kewajiban melakukan graduasi mandiri

c. Bentuk kegiatan dan Program

Dalam Kegiatan yang akan dilakukan di Kelurahan Kebon Jayanti, a kegiatan yang akan dilakukan yaitu :

- 1) Sosialisasi Mengenai Konsep dari Graduasi Dalam Program PKH.

Dengan melakukan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dapat mengetahui tentang program PKH dengan mengumpulkan masyarakat dan stakeholder. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman terkait program PKH, tujuan dari PKH, berapa lama KPM memperoleh bantuan, kewajiban masyarakat melakukan graduasi apabila sudah mapan. Kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat terkait perubahan peningkatan perekonomian keluarganya. Dalam kegiatan ini akan membahas mengenai perubahan peningkatan perekonomian keluarga yang dilihat dari pendapatan upah perbulan, perubahan pekerjaan, memperoleh harta warisan, dan hal-hal yang merubah perekonomian keluarganya.

Tabel 6. Bentuk Kegiatan Program Prifil Analsis Sumber Dana Bantuan Sosial

Kegiatan Penyelesain Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Indicator Keberhasilan
Sosialisasi	KPM PKH	Peningkatan	Pendamping	Kepala Lurah	1 hari	Meningkatakan pemahaman

Terkait Konsep dari Graduasi Dalam Program PKH		pemahaman KPM terkait konsep dari graduasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).	PKH dan Dinas Sosial	Kelurahan Babakan Surabaya		masyarakat terkait konsep dari graduasi dalam program PKH Meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk melakukan graduasi sejahtera
--	--	--	----------------------	----------------------------	--	--

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat pihak-pihak terkait dalam program Sosialisasi yang akan dilakukan. Dalam sistem partisipasi ini terdiri dari *inisiator system, chage agent system, support system, controlling system, implementing system, target system, dan asction system*. Berikut tabel yang dapat dilihat dari system partisipasi :

Tabel 7. Sistem Partisipasi Kegiatan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pendamping PKH
2.	<i>Chage Agent System</i>	Pendamping PKH
3.	<i>Client System</i>	Warga Kelurahan Kebon Jayanti sebagai penerima manfaat Program PKH
4.	<i>Support System</i>	1. RT dan RW 2. Pihak Kelurahan 3. Pendamping PKH
5.	<i>Contrilling System</i>	Pendamping PKH
6.	<i>Implementing system</i>	1. RT dan RW 2. Pendamping PKH 3. Masyarakat 4. Dinas Sosial
7.	<i>Target System</i>	Warga Kelurahan Kebon Jayanti penerima bantuan PKH
8.	<i>Action System</i>	Pekerja Sosial dan Dinas Sosial kota Bandung

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah pengembangan Masyarakat (*Community Organization*)/Pengembangan Organisasi (*Community Development*). CO/CD adalah salah satu metode yang digunakan dalam praktik pekerja sosial dengan fokus utama adalah level komunitas atau masyarakat lebih luas. CO/CD juga dimaksud untuk proses memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Teknik yang digunakan yaitu Penyuluhan Sosial. Penyuluhan sosial merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui edukasi, komunikasi, motivasi, dan penyebarluasan informasi oleh aktor penyuluh sosial baik secara lisan maupun tulisan atau peragaan kepada khalayak sasaran sehingga muncul pemahaman, pengetahuan dan kemampuan yang sama guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Pelaksanaan Program Sosialisasi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan hambatan dalam melakukan graduasi membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan program, dimana anggaran ini dipergunakan untuk mendanai pemateri, menyiapkan konsumsi untuk peserta dan mendanai alat dan bahan yang dibutuhkan dalam program sosialisasi ini. berikut tabel acuan dasar dalam pelaksanaan program sosialisasi ini :

Tabel 8. Anggaran Biaya kegiatan Profil Analisis Sumer Dana Bantuan Sosial

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Logistik					
1.	Benner Kegiatan Sosialisasi	1	Lembar	100.000,00	100.000,00
2.	ATK	4	Paket	50.000,00	200.000,00
Jumlah 1					300.000,00
Honor					
1.	Dinas Sosial			1.000,00	1.000,00
Jumlah II					1.000.000,00
Konsumsi					
1.	Snack Panitia	7	Box	15.000,00	105.000,00

2.	Snack Narasumber	1	Box	30.000,00	30.000,00
3.	Snack Peserta	40	Box	15.000,00	600.000,00
Jumlah III					735.000,00
Jumlah Keseluruhan					2.035.000,00

Alat dan Bahan :

1. Laptop/computer
2. Mikrofon meja
3. Proyektor/infokus
4. Kursi
5. Speaker
6. Kertas plano
7. Alat tulis
8. Kerjas HVS
9. Taplak meja

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan sebuah teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*).

Tabel 9. Analisis SWOT Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Faktor internal	Kekuatan (<i>Strength</i>) :	Kelemahan (<i>Weakness</i>) :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya partisipasi aktif dari KPM 2. Sosialisasi ini dibutuhkan untuk para KPM dari program PKH 3. Pembentukan tim kerja yang kompeten dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya menyamakan waktu sosialisasi yang sesuai antara KPM dan Panitia acara 2. Tidak adanya KPM yang berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan

Faktor eksternal	tugasnya	
	Peluang (<i>Opportunity</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan sasaran dari program ini sudah tepat yaitu KPM PKH 2. Materi yang dibawakan disampaikan langsung oleh pihak Dinas Sosial 3. Mendapat dukungan dari masyarakat dan pihak Kelurahan 	Strategi SO : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan narasumber dan panitia pelaksanaan kegiatan 2. Memanfaatkan media yang sudah tersedia untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan
Ancaman (<i>Threaats</i>) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta sosialisasi tidak datang untuk mengikuti kegiatan 	Strategi ST : <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu senggang dari KPM PKH 	Strategi WT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan baik

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah dan pelaksanaan kegiatan bertujuan agar jalannya acara menjadi lancar dan berjalan dengan sistematis agar tercapainya tujuan program. Adapun langkah dan pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Tahap pra kegiatan

- a) Membentuk panitia kerja dan melakukan rapat terkait pelaksanaan program yang meliputi konsep dari penyuluhan yang akan di adakan, menyusun jadwal kegiatan, dan menentukan narasumber yang akan menjadi pembicara.
- b) Menyusun proposal kegiatan
- c) Mengurus izin kegiatan dan menyebarkan undangan kepada narasumber serta peseta kegiatan

2. Tahap pelaksanaan

Susunan acara dalam Program Sosialisasi terkait Konsep Graduasi Dalam Program PKH sebagai berikut :

Tabel 10. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
1.	09.00-09.30	Registrasi Peserta	Divisi Acara	Divisi Acara
2.	09.30-09.45	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3.	09.45-10.00	Sambutan Lurah	Lurah	Divisi Acara
4.	10.00-10.45	Pemaparan Materi terkait Mekanisme dan Konsep Graduasi dalam program PKH	Pihak Dinas Sosial	Divisi Acara dan Humas
5.	10.45-11.05	Sesi Tanya Jawab	Pihak Dinas Sosial	Divisi Acara dan Humas
6.	11.05-11.15	Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
7.	11.15-11.30	Penutup	MC	Divisi Acara

3. Tahap Pengakhiran

Evaluasi merupakan kegiatan atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegoatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan yang dilakukan.

Setelah melakukan evaluasi hal yang dilakukan selanjutnya pada tahapan pengakhiran adalah melakukan pelaporan dan menyusun lembar pertanggung jawaban dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan.

2.3 Profil Pemberdayaan Sosial

2.3.1 Gambaran Umum Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Di Indonesia masalah kemiskinan ini menjadi salah satu masalah yang mendasar, lonjakan penduduk yang meningkat, dan Pandemi yang terjadi dari tahun 2020 sampai 2023 juga menjadi faktor yang meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun September 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 26, 36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022.

Di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung angka kemiskinan terhitung dari banyaknya jumlah penerima bantuan PKH dan BPNT sebanyak 729 peserta dari jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 13.414 jiwa data ini berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2017. Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara yang dilakukan langsung oleh praktikan dilihat dari keadaan masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan sebagai fakir miskin.

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 pada Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dan/atau keluarganya. Berdasarkan pengertian fakir miskin yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat miski adalah masyarakat yang rentan akan menghadapi risiko-risiko sosial.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjadikan masyarakat kembali mampu menjalankan keberfungsian sosialnya dapat dilakukan melalui pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial (*empowerment*) merupakan strategi peningkatan “daya” atau kekuatan (*power*) individu, lembaga dan komunitas. Menurut Edi Suharto Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan keadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata.

2.3.2. Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a) Konsep Fakir Miskin

1. Fakir Miskin

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

2. Kriteria Fakir Miskin

Dalam dictum kedua dari keputusan menteri sosial tersebut yang disebut Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- b) Mempunyai pengeluaran sebagai besar digunakann untuk konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
- c) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
- d) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun setiap anggota rimah tangga
- e) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anknya sampai jenjang pendidikan sekolah lantut tingkat pertama
- f) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang
- g) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau air tak terlindungi/air/sungau/air hujan/lainnya

Menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikatakan masyarakat miskin jika dalam rumah tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria miskin sebagai berikut :

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan
- c) Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembk tanpa diplaster
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah

- h) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu minggu sekali
- i) Hanya membeli satu stel pakaian aru dalam setahun
- j) Hanya sanggup membayar makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.00 per bulan
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
- n) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.00 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

b) Konsep Pemberdayaan

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata (Edi Suharto, 2005)

2. Tujuan Pemberdayaan

Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1) Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran anggota lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing

2) Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu perbaikan kelembagaan juga diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan dan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.

3) Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota lembaga tersebut dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Salah satu contoh dalam hal ini adalah suatu kawasan menurut ketentuan yang berkembang harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak kurang lebih 40%. Hal ini berarti masyarakat diharapkan tidak semena-mena melakukan penerbanngan pohon yang bisa menyebabkan banjir ataupun longsor. Oleh sebab itu maka masyarakat harus memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tidak melakukan tindakan semena-mena seperti melakukan tindakan pengrusakan lingkungan karena terdesak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

5) Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Tingkat kehidupan manusia dapat diukur dari berbagai indikator, diantara adalah tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dari setiap warganya. Dengan pendapatan yang membaik diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perubahan Masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Tahapan Pemberdayaan

Terdapat tujuh tahapan dalam pemberdayaan :

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua hal yang harus dikerjakan yaitu pertama, menyiapkan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*. Dan kedua, menyiapkan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara non direktif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan sangat penting agar suatu program atau kegiatan dapat berjalan dan tercapai dengan baik.

2) Tahap Pengkajian “Assessment”

Pada tahap pengkajian ini proses yang dilakukan individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. dalam al ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan

“feel needs” dan juga daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak akan terjadi kasus tidak dapat sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen “change agent” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memberikan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pemformalitan Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasi gagasan mereka ke dalam bentuk tulisan terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

5) Tahap ‘Implementasi’ Program atau Kegiatan

Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Pada tahap ini supaya seluruh program dapat dipahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sasarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaliknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuknya suatu sistem komunikasi untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode

berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan atau kendala yang dihadapi.

7) Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunikasi sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengukur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Naijayatu, dkk, terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan :

1. Kesetaraan

Kesetaraan atau kesejahteraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan dan dengan pihak-pihak yang terlibat. Dinamika yang terbangun adalah kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian, sehingga terjadi proses saling belajar. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya

2. Partisipasi

Program yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipasif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tahap ini tentu dibutuhkan proses pendampingan yang panjang, waktu yang lama dan komitmen tinggi terhadap pemberdayaan. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapat arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan daripada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut

keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegoatan pemerdayaan tersebut.

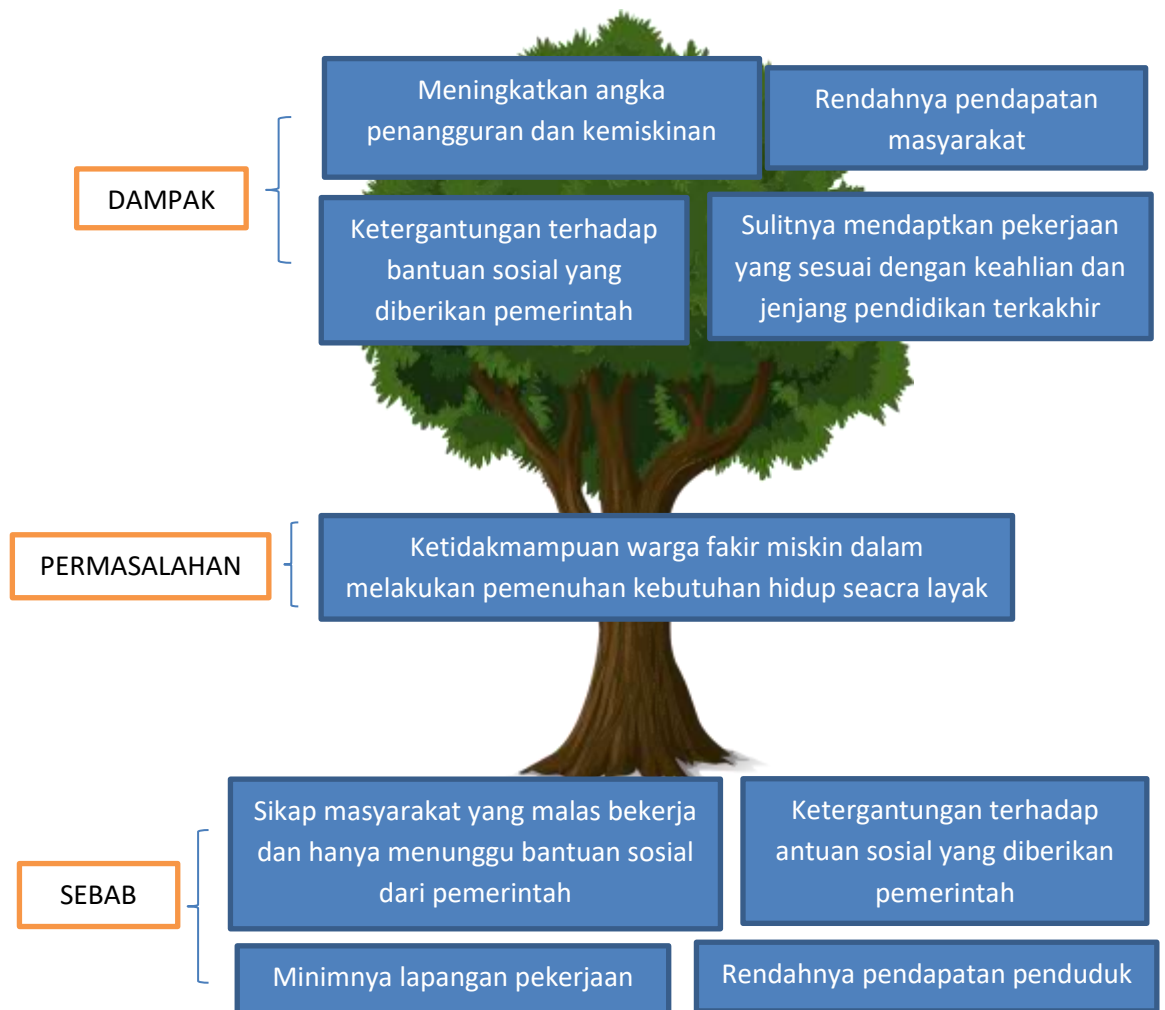
2.3.3 Asesmen

Asesmen yang dilakukan dalam Profil Pemberdayaan Sosial praktikan menggunakan teknik wawancara dan home visit. Dalam wawancara yang dilakukan, praktikan mendapat isu masalah terkait fakir miskin dimana fakir ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam teknik home yang dilakukan oleh praktikan, praktikan memperoleh informasi terkait gambaran umum situasi sosial dan ekonomi warga fakir miskin.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi praktikan memperoleh beberapa identifikasi masalah terkait fakir miskin di Kelurahan Kebon Jayanti sebagai berikut :

- 1) Pemberian Bantuan Sosial belum secara menyeluruh mengcover masyarakat miskin yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan dan warga sekitar masih terdapat masyarakat yang belum tercover bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan data para masyarakat miskin masih ditampung di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 2) Belum adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak terkait untuk menangani fakir miskin agar dapat berdaya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait proses pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah fakir miskin.
- 3) Keterbatasan modal yang dialami oleh para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Masalah ini sering dialami oleh para pelaku usaha hal ini dikarenakan setelah meminjam uang kepada Bank para pelaku usaha tidak mampu memasarkan produknya agar menarik konsumen yang menyebabkan banyak para pelaku usaha terlilit hutang Bank.



Gambar 3. Pohon Masalah Analisis Pemberdayaan Sosial

a) Penyebab masalah

a. Minimnya lapangan pekerjaan.

Minimnya lapangan pekerjaan di wilayah kebon jayanti mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja bagi para fakir miskin. Selain keterbatasan lapangan pekerjaan ada juga masyarakat yang memiliki usahanya sendiri namun tidak berkembang dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait bagaimana cara menarik minat para pelanggan untuk membeli dagangannya.

b. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Rendahnya pendidikan masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan terakhirnya. Selain itu pendidikan yang rendah juga menjadikan penyebab para generasi muda tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan mereka dimana jenjang pendidikan terakhir para warga adalah SMP/SMA.

- c. Sikap masyarakat yang tidak mau bekerja dan hanya menunggu bantuan sosial dari pemerintah.

Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah menyebabkan masyarakat menjadi tidak mau bekerja.

- d. Kurangnya keahlian dan kemampuan masyarakat dalam melihat peluang-peluang usaha yang ada.

Kurangnya keahlian masyarakat dalam melihat peluang-peluang usaha yang ada juga menjadikan rendahnya pendapatan masyarakat di Kelurahan Kebon Jayanti, kurangnya keahlian ini juga menjadikan masyarakat hanya melihat peluang-peluang usaha yang sudah banyak digeluti oleh masyarakat lainnya.

b) Dampak Masalah

- a. Meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Sulitnya mendapatkan pekerja yang sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan terakhir para fakir miskin di Kelurahan Kebon Jayanti.

- b. Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Ketergantungan yang dimaksud adalah dari banyaknya bantuan sosial yang diberikan menjadikan masyarakat sangat bergantung dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan. Ketergantungan ini juga berkaitan dengan sikap masyarakat yang merasa cukup hanya dengan memperoleh bantuan dari pemerintah saja.

- c. Rendahnya pendapatan masyarakat.

Rendahnya pendapatan masyarakat ini berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di setiap bulannya atau setiap harinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

c) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Kemiskinan ini pada dasarnya dipicu oleh rendahnya angka pendidikan di suatu daerah, migrasi masyarakat dari desa ke kota, jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit yang tidak mampu memenuhi banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin yang terdata dan menjadi penerima bantuan PKH dan BPNT sebanyak 729 penerima manfaat. Jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta penerima bantuan PKH dan BPNT dikategorikan masyarakat miskin namun mereka sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Setelah melakukan wawancara dan observasi langsung dapat

dilihat dari lingkungan sosial dan keadaan masyarakat setempat masih banyak masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin dimana mereka masih terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Kebon Jayanti ini diperlukan adanya Pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial yang dimaksud adalah sebagai upaya yang dapat membantu individu, kelompok, keluarga dan masyarakat untuk untuk mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatur dan mengambil keputusan secara mandiri.

d) Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah yang telah disetukan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait potensi dan sumber yang dimiliki
2. Pelatihan terkait peningkatan ekonomi melalui ekonomi kreatif

e) Identifikasi Potensi dan Sumber

Identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyelesaian masalah yang dialami oleh fakir miskin adalah sebagai berikut :

1) Bank milik Pemerintah atau Swasta

Dalam pengembangan UMKM beberapa bank ikut berpartisipasi dalam pembeberian modal hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Hal ini dapat menjadi potensi yang dimiliki oleh para fakir miskin baik itu dalam hal peminjaman modal untuk membuka usahanya sendiri.

2) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam ini adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam seringkali disebut dengan KSP dan Kospin Jasa. Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam modal yang berasal dari simpanan pinjaman pokok anggotanya . selain itu, koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana dari skema dana cadangan dari sisa hasil usaha (SHU), modal pinjaman dari pengurus koperasi, dan hibah. Potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah koperasi simpan pinjam yang ada di Kelurahan Kebon Jayanti.

3) Aparat Kelurahan

Aparat kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota terdekat yang memberikan pelayanan kepada rakyat. Hal ini dapat dijadikan sumber untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan berperan sebagai pengawas dalam keberlanjutan pemberdayaan yang dilakukan kepada fakir miskin.

4) *Home Industry* yang bergerak di bidang fashion

Terdapat beberapa *Home Industry* yang bergerak di bidang konfeksi yang berada di Kelurahan Kebon Jayanti. *Home Industry* ini dapat menjadi potensi sumber untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait teknik-teknik dalam menjahit dan usaha ekonomi kreatif yang bergerak di bidang fashion.

2.3.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang Intervensi

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat berdaya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman, peningkatan kapasitas, peningkatan keterampilan dan lain sebagainya. Pemberdayaan masyarakat dianggap penting agar masyarakat mampu berdaya dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah fakir miskin di Kelurahan Kebon Jayanti adalah pemberdayaan sosial yang dilakukan melalui peningkatan ekonomi kreatif bagi para fakir miskin, pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadikan solusi untuk masyarakat yang dikategorikan fakir miskin.

Pemberdayaan yang akan dilakukan di Kelurahan Kebon Jayanti ini berupa pelatihan ekonomi kreatifitas yang bergerak di bidang fashion. Dalam pelatihan ini diharapkan masyarakat mampu mengelola sumber daya manusia ataupun sumber daya alam di sekitar mereka. Pemberdayaan ini juga berupaya meningkatkan kreatifitas masyarakat agar mampu melihat peluang-peluang usaha yang ada di sekitar mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas maka praktikan membuat program Pelatihan Ekonomi Kreatif yang Bergerak Di Bidang *fashion*.

b. Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Program Pelatihan Ekonomi Kreatif yang bergerak di bidang fashion ini memiliki tujuan umum yaitu meningkatkan keterampilan fakir miskin dalam bidang *fashion*.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program Sosialisasi Peningkatan kapasitas fakir miskin melai Ekonomi Kreatif ini sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kreatifitas fakir miskin melai ekonomi kreatif di bidang fashion
- b) Fakir miskin memiliki kemandirian melalui usaha ekonomi kreatif di bidang fashion

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Pelatihan Ekonomi Kreatif yang Bergerak Di Bidang fashion dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, dan pembentukan kelompok usaha.

1) Pelatihan

Dalam kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat dalam peningkatan ekonomi kreatif. Dalam pelatihan ini akan dilakukan praktik membuat beberapa makanan khas daerah yang terkenal dan memiliki potensi untuk dijadikan sebuah produk yang dapat diperjual belikan.

2) Pembentukan Kelompok Usaha

Pembentukan kelompok yang beranggotakan warga fakir miskin ini nantinya masing-masing anggota akan diberikan pemahaman terkait cara mengembangkan usahanya melalui berbagai *platform*.

3) Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memantau jalannya kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.

Tabel 11. Bentuk Kegiatan Profil Analis Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Penyelesain Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Indicator Keberhasilan
Sosialisasi Peningkatan kapasitas fakir miskin melai Ekonomi Kreatif	Fakir Miskin	Peningkatan keterampilan fakir miskin dalam mengolah makanan-makanan khas daerah	Pekerja Sosial Dinas Sosial	Kepala Lurah Kelurahan Babakan Surabaya	2 hari	Menurunkan angka kemiskinan di Kelurahan Kebon Jayanti Terbentuknya lapangan pekerjaan baru di Wilayah Kelurahan Kebon Jayanti

d. Sistem Partisipasi

Sistem partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat pihak-pihak terkait dalam program Pelatihan yang akan dilakukan. Dalam sistem partisipasi ini terdiri dari *inisiator system*, *chage agent system*, *support system*, *controlling system*, *implementing system*, *target system*, dan *asction system*. Berikut tabel yang dapat dilihat dari system partisipasi :

Tabel 12. Sistem Partisipasi Kegiatan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Dinas Sosial
2.	Chage Agent System	Pihak Kelurahan
3.	Client System	Warga Kelurahan Kebon Jayanti yang dikategorikan fakir miskin
4.	Support System	1. RT dan RW 2. Pihak Kelurahan 3. Bank dan Koperasi simpan pinjam
5.	Contrilling System	Pihak Kelurahan
6.	Implementing system	1. RT dan RW 2. Pihak Kelurahan 3. Masyarakat 4. Dinas Sosial
7.	Target System	Warga Kelurahan Kebon Jayanti yang dikategorikan sebagai fakir miskin
8.	Action System	Pekerja Sosial dan Dinas Sosial kota Bandung

d. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah pengembangan Masyarakat (*Community Organization*)/Pengembangan Organisasi (*Community Development*). CO/CD adalah salah satu metode yang digunakan dalam praktik pekerja sosial dengan fokus utama adalah level komunitas atau masyarakat lebih luas. CO/CD juga dimaksud untuk proses memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial ddengan sumber-sumber

kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Teknik yang digunakan adalah *Capacity building* yang dapat diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

e. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

1. Rencana Anggaran

Pelaksanaan Program Pelatihan Ekonomi Kreatif dalam Bidang Fashion ini membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan programnya. Anggaran ini digunakan untuk membeli alat peraga dalam program sosialisai dan prasarana lainnya. Maka dari itu berikut acuan dasar anggaran dalam program pelatihan ini

Tabe 13. Rencana Anggaran kegiatan Profil Analis Pemberdayaan Sosial

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Logistik					
1.	Benner Kegiatan Sosialisasi	1	Lembar	100.000,00	100.000,00
2.	Mesin jahit	5	Buah	3.000.000,00	15.000.000,00
3.	Kain	90	Meter	800.000,00	800.000,00
4.	Benang	10	Paket	25.000,00	250.000,00
Jumlah I					16.150.000,00
Honor					
1.	Dinas Sosial			1.000.000,00	1.000,00
2.	Narasumber			1.000.000,00	1.000,00
Jumlah II					2.000.000,00
Jumlah Keseluruhan					18.150.000,00

2. Alat dan Bahan

- Computer/laptop
- Infocus
- Mikrofon
- Speker
- Meja

- Kursi
- Kertas plano
- Kertas HVS
- Alat tulis
- Taplak meja

f. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan sebuah teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*Strangth*) dan kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Theats*).

Tabel 14. Analisis SWOT Profil Analis Pemberdayaan Sosial

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan (<i>Strange</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan sosial 2. Keinginan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah 2. Memerlukan anggaran yang besar
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <p>Adanya dukungan dari pihak kelurahan dan pemerintah daerah</p>	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam setiap kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan bersama dengan masyarakat yang menjadi 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meyesuaikan dengan waktu luang sasaran program 2. Membuat proposal pengajuan dana

	sasaran program 2. Bekerjasama dengan para sasaran untuk meningkatkan perekonomian melalui kegiatan yang akan dilakukan	kepada dinas sosial.
Ancaman (<i>Treats</i>) 1. Minimnya participasi warga dalam program yang akan dilaksanakan 2. Keterbatasan modal yang diberikan oleh pihak bank dan koperasi	Strategi ST Pemeberdayaan sosial dilakukan mampu mengasah kreatifitas masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melihat potensi yang ada	Strategi WT Adanya pelatihan dan monitoring yang dilakukan akan menjadikan program pemberdayaan ini dapat berjalan efektif

g. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah dan pelaksanaan kegiatan bertujuan agar jalannya acara menjadi lancar dan berjalan dengan sistematis agar tercapainya tujuan program. Adapun langkah dan pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Tahap pra Kegiatan
 - a) Membentuk panitia kerja dan melakukan rapat terkait pelaksanaan program yang meliputi konsep dari penyuluhan yang akan di adakan, menyusun jadwal kegiatan, dan menentukan narasumber yang akan menjadi pembicara
 - b) Menyusun proposal kegiatan
 - c) Mengurus izin kegiatan dan menyebarkan undangan kepada narasumber serta peseta kegiatan

2. Tahap Pelaksanaan

Susunan acara dalam pelaksanaan Program Pelatihan Peningkatan Ekonomi Kreatif dalam Bidang Fashion sebagai berikut :

Tabel 15. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
HARI PERTAMA				
1.	09.00-09.30	Registrasi Peserta	Divisi Acara	Divisi Acara
2.	09.30-09.45	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3.	09.45-10.00	Sambutan Lurah	Lurah	Divisi Acara
4.	10.00-10.30	Pemaparan Materi terkait pelatihan	Pihak Dinas Sosial	Divisi Acara dan Humas
5.	10.30-11.00	Ishoma		
6.		Pelatihan menggunakan mesin jahit	Narasumber dari sukses yang mengembangkan usahanya melalui UMKM	Divisi acara
7.	11.10-11.30	Sesi Tanya jawab	Pihak Dinas Sosial	Divisi Acara dan Humas
8.	11.30-11.35	Dokumentasi	Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
HARI KEDUA				
1.	08.00-09.30	Pelatihan pemotongan bahan/kain	Narasumber	Divisi Acara
2.	09.30-11.30	Pelatihan menjahit	Narasumber	Divisi Acara
3.	11.30-12.00	Penutup dan dokumentasi	MC	Divisi Acara

3. Tahap Pengakhiran

Evaluasi merupakan kegiatan atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegoatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan yang dilakukan.

Setelah melakukan evaluasi hal yang dilakukan selanjutnya pada tahapan pengakhiran adalah melakukan pelaporan dan menyusun lembar pertanggung jawaban dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan.

2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

2.4.1 Gambaran Umum Masalah

Kota/desa pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di Indonesia bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut berarti pula bertambahnya jumlah tempat untuk bermukim. Karena pertumbuhan tempat bermukim yang sangat pesat sedang luasan lahan yang terbatas maka menyebabkan tumbuhnya permukiman padat. Disamping itu kurangnya ketersediaan ruang tersebut berakibat pada pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak tertata dan tidak terkendali yang mengakibatkan terjadinya kondisi kumuh pada kawasan permukiman itu sendiri.

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Jumlah masyarakat Indonesia terus menerus bertambah setiap tahunnya. Angka pernikahan meningkat dan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi menyebabkan kepadatan penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah kelahiran yang terus meningkat dan kelahiran yang tidak direncanakan dengan baik juga sangat berpengaruh pada tingkat kepadatan penduduk.

Wilayah kebon jayanti dapat dikatakan daerah padat penduduk dan lahan milik pemerintah seperti lahan milik PT KAI masih di bangun bangunan tempat tinggal beberapa warga. Faktor penyebab terjadinya kepadatan penduduk di wilayah Kelurahan Kebon Jayanti adalah angka migrasi yang tinggi yang diiringi dengan angka kelahiran yang tinggi. Selain itu penetapan pendirian bangunan dan masih banyak warga yang belum memiliki surat izin kepemilikan rumah. Beberapa faktor yang dijelaskan sebelumnya berdampak pada meningkatnya angka pertumbuhan, menimbulkan pemukiman kumuh, dan berdampak pada jika terjadi pengusuran masyarakat tidak memiliki hak atas tanah atau bangunan rumahnya.

2.4.2 Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a) Konsep Penataan Lingkungan

1. Penataan Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan symbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan.

2. Jenis-Jenis Lingkungan Sosial

- 1) Lingkungan Sosial Primer adalah salah satu jenis lingkungan sosial yang mana terdapat sebuah hubungan yang erat diantara anggota satu dengan anggota lainnya yang saling mengenal baik dengan lainnya.
- 2) Lingkungan Sosial sekunder adalah salah satu jenis lingkungan sosial yang memiliki hubungan diantara anggota satu dengan anggota lainnya memiliki jarak atau kurang akrab.

3. Faktor-faktor lingkungan sosial

- 1) Pengelompokan sosial ialah berbagai macam orang yang membentuk persekutuan atau pengelompokan sosial yang dilandasi hubungan kekerabatan (*genealogical based relationship*), seperti keluarga inti atau bati, marga atau klien, suku bangsa dan lain-lain.
- 2) Penataan sosial sangat diperlukan untuk mengatur keterlibatan hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih sari satu orang. Penataan itu dapat berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama dalam menggalang kerja sama dan pergaulan sehari-hari antar anggotanya. Setiap orang harus jelas kedudukannya dan peran-peran yang harus diberikan dan apa yang dapat diharapkan dari pihak lainnya.
- 3) Pranata sosial, dikembangkan atas dasar kepentingan penguasaan lingkungan permukiman yang amat penting artinya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan. Berbagai peraturan dikembangkan untuk menyisihkan orang-orang yang bukan anggota kesatuan sosial yang bersangkutan.
- 4) Kebutuhan Sosial, dapat dikatakan bahwa suatu lingkungan sosial terbentuk karena adanya keinginan manusia demi memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Karena sebagai makhluk sosial sudah jelas bahwa tidak semua kebutuhan hidup mereka dapat dipenuhi oleh diri sendiri, terutama masalah kebutuhan sosial seperti kebutuhan interaksi dengan orang lain.

b) Konsep Penduduk

1. Pengertian Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang mendiami wilayah dan perwilayahan tertentu pada waktu tertentu dengan keterkaitan hubungan antara jumlah, usia, status perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas, dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan perpolitikan yang memiliki hak dan kewajiban.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 26 Tahun 195, penduduk adalah sekelompok warga Negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang wilayahnya tersebut dijadikan domisili atau wilayah sementara dan dapat juga untuk ditinggali secara menetap.

Beberapa ahli juga berpendapat mengenai pengertian penduduk salah satunya adalah Mantra (2009), penduduk adalah individu dengan status sosialnya sebagai pribadi, anggota dalam keluarga, masyarakat, warga negara, dan serangkaian himpunan kualitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu.

2. Dampak dari kepadatan penduduk

Menurut Cristiana, tedjo, & Martono, 2014 adapun dampak dari ledakan penduduk adalah :

- a) Semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, yang layak). Akibatnya sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak lagi sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk
- b) Tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan yang ada (sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi) serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan lain.
- c) Tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada, akibatnya terjadinya peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak pada menurunnya kualitas sosial (banyak tunawisma, pengemis, kriminalitas meningkat dan lain-lain).

c) Konsep Pemukiman

1. Pengertian pemukiman dan Perumahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, fasilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana

dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak hunian.

2.4.3 Asesmen

Dalam asesmen yang dilakukan untuk Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan menggunakan teknik wawancara dan home visit. Dalam wawancara yang dilakukan praktikan memperoleh isu masalah terkait penataan lingkungan dimana di beberapa RW merupakan kawasan padat pemukiman dimana penyebab dari padatnya pemukiman ini adalah tingginya arus urbanisasi. Dalam teknik home visit yang dilakukan oleh praktikan, praktikan mendapatkan gambaran umum kondisi pemukiman dan gambaran kondisi kesehatan masyarakat yang bermukim di kawasan padat pemukiman.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi praktikan menemukan identifikasi masalah yang yaitu kepadatan penduduk yang sering menjadi keluhan masyarakat, hal ini dikarenakan urbanisasi yang meningkat dan tingkat perkeonomian masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka tidak mampu menempati membangun rumah di kawasan yang tidak padat pemukiman.

a) Penyebab Masalah

a. Meningkatnya angka pertumbuhan dan migrasi.

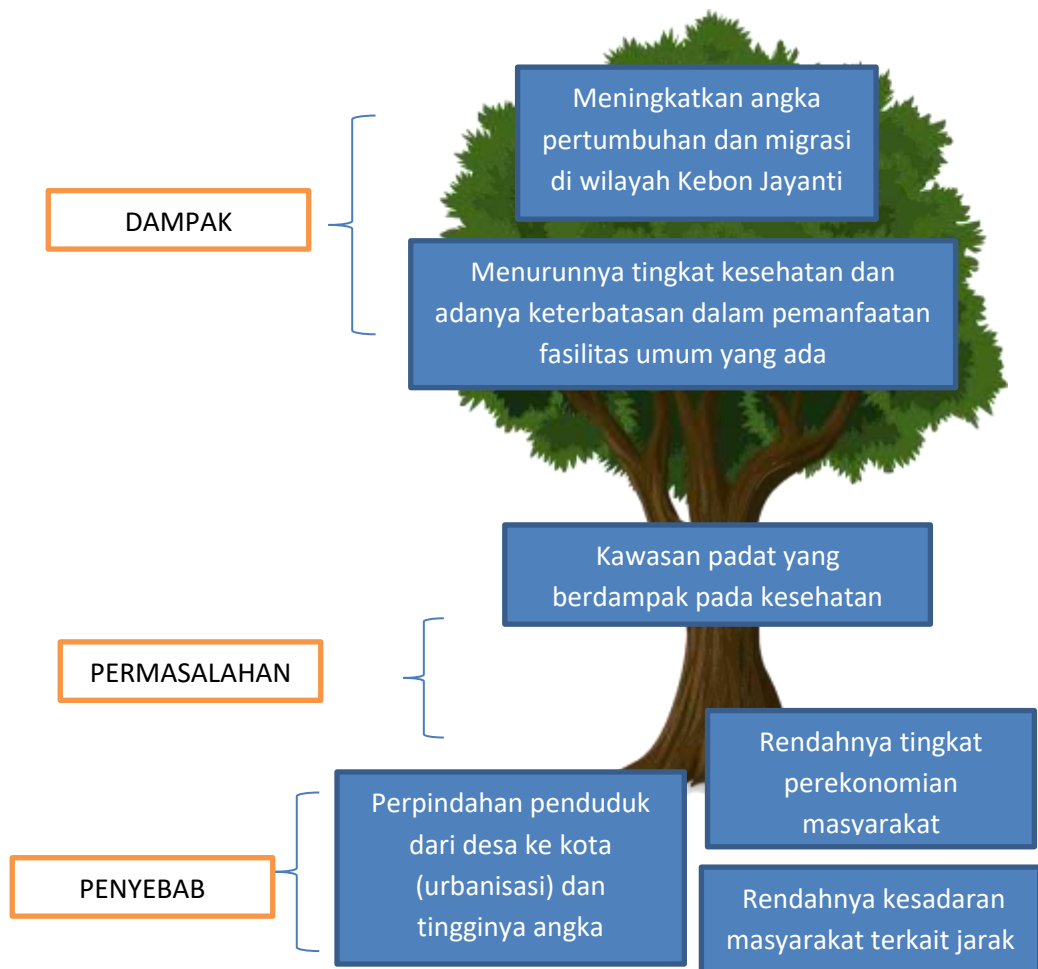
Angka perpindahan penduduk dari desa ke kota menimbulkan pemukiman padat hal ini menyebabkan dalam satu bangunan rumah ditinggali oleh beberapa keluarga.

b. Rendahnya tingkat perekonomian

Penyebab terjadinya pemukiman padat di kawasan Kelurahan Kebon Jayanti adalah rendahnya tingkat perekonomian hal ini menyebabkan masyarakat sekitar tidak mampu mendirikan rumah di kawasan yang tidak padat..

c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari jarak rumah yang terlalu berdekatan.

Rendahnya pemahaman masyarakat terkait dampak dari jarak rumah yang terlalu dekat dapat mengakibatkan masalah-masalah seperti kesehatan, apat menimbulkan bencana contohnya kebakaran dan lain sebagainya.



Gambar 4 Pohon Masalah Analisis Penataan Lingkungan Sosial

b) Dampak Masalah

Dampak yang disebabkan dari masalah kepadatan pemukiman adalah meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Kebon Jayanti yang menyebabkan semakin banyak masyarakat yang membangun perumahan atau memanfaatkan bangunan yang ada dan juga semakin banyaknya jumlah penduduk juga, dampak lain dari pemukiman padat juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat dimana dengan padatnya pemukiman secara tidak langsung jarak antar rumah juga tidak diperkirakan hal ini lah yang menjadikan mudahnya penyebaran penyakit, berisiko akan bencana non alam seperti kebakaran.

c) Fokus Masalah Utama

Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung untuk tempat masyarakat beraktivitas. Kelurahan Kebon Jayanti memiliki luas 27, 5 Ha dimana pemanfaatan lahannya untuk

tanah pemukiman sebesar 25, 5 Ha dan untuk fasilitas umumnya seluas 1,5 Ha dengan jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2017 sebanyak 13. 14 jiwa. Setelah melakukan observasi dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kawasan yang dapat dikatakan padat pemukiman dimana secara spesifik kondisi perumahan di Kelurahan Kebon Jayanti terdiri dari kawasan kompleks PINDAD, dengan luas wilayah 27, 5 Ha wilayah Kebon Jayanti didominasi oleh kawasan pemukiman dan pasar. Pada RW 01 sampai RW 07 merupakan kawasan padat penduduk. Selanjutnya RW 08 terdiri dari 7 RT terdiri dari kawasan padat penduduk. Selanjutnya RW 08 terdiri dari 7 RT kawasan padat penduduk. RW 09 terdiri dari 8 RT adalah kompleks PINDAD kemudian dari RW 10 sampai RW 14 merupakan kawasan padat penduduk.

Kepadatan penduduk ini menjadi isu yang penting untuk diselesaikan hal ini dikarenakan berdampak pada kesehatan masyarakat. dampak pada kesehatan masyarakat terkait masalah kepadatan pemukiman yaitu pada pola hidup sehat dan berdampak pula penularan penyakit yang dapat terjadi lebih cepat dikarenakan perumahan yang dibangun secara berdekatan.

2. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi masalah ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak yang disebabkan oleh pemukiman yang padat. Selain itu identifikasi kebutuhan masyarakat juga berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat untuk menghindari dampak-dampak yang disebabkan oleh pemukiman padat.

3. Identifikasi Potensi dan Sumber

Identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan yaitu :

1) Tokoh Masyarakat

Participasi masyarakat dalam menangani masalah ini sangat penting hal ini dikarenakan masyarakat dapat berperan sebagai pendukung jalannya pelaksanaan program yang akan dilakukan.

2) Aparat Kelurahan

Aparat desa dalam permasalahan ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penyuluhan sosial sekaligus sebagai sistem sumber pendukung untuk program yang akan direncanakan. Dinas Perkerja Umum Penataan Ruang ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman terkait pembangunan bangun yang sesuai dengan aturan yang ada.

3) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman masyarakat dampak pemukiman padat konteks kesehatan.

2.4.4 Rencana Intervensi

a. Latar Belakang Intervensi

Kelurahan Kebon Jayanti merupakan kawasan padat pemukiman hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduknya dan rumah-rumah yang saling berdempetan satu dengan lainnya dan juga masyarakat yang kurang peduli akan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan permasalahan penataan lingkungan sosial dengan kondisi wilayah di kelurahan dimana kepadatan pemukiman ini menjadi masalah yang cukup sering menjadi keluhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dari itu diperlukan Sosialisasi terkait peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat. Dalam kegiatan sosialisasi ini kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat. Program sosialisasi ini akan melibatkan beberapa pihak atau sistem sumber seperti tokoh masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruan, aparat kelurahan, dan dinas sosial.

b. Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Tujuan umum dari Sosialisasi Dampak Pemukiman Padata Bagi Kesehatan Masyarakat adalah Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat.

Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari Sosialisasi Dampak Pemukiman Padata Bagi Kesehatan Masyarakat adalah Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat.

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat
2. Membiasakan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat
3. Menciptakan sifat kegotong royongan dalam menjaga kebersihan lingkungan

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Bentuk Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pemukiman padat di bidang kesehatan. yaitu :

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan

K3 dalam usaha industrinya. Dalam sosialisasi ini akan memberikan edukasi terkait penerapan K3 dalam usaha *home industry*.

2. Motitoring

Monitoring adalah proses rutin untuk melihat kemajuan dari sosialisasi yang dilakukan. Monitoring bertujuan untuk menjaga agar imolemestasi program sesuai dengan tujuan yang ada dalam program sosialisasi yang akan dilakukan.

Tabel 16. Bentuk Kegiatan Program Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Indikator Keberhasilan
Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pemukiman padat di bidang kesehatan.	Masyarakat di kawasan padat pemukiman	Peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak dari pemukiman padat di bidang kesehatan	Dinas Kesehatan Dinas PUPR	Lurah Kelurahan Kebon Jayanti	1 hari	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat Meningkatnya kesehatan masyarakat di kawasan padat pemukiman

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat pihak-pihak terkait dalam program Sosialisasi yang akan dilakukan. Dalam sistem partisipasi ini terdiri dari *inisiator system*, *chage agent system*, *support system*, *controlling system*, *implementing system*, *target system*, dan *asction system*. Berikut tabel yang dapat dilihat dari system partisipasi :

Tabel 17. Sistem Partisipasi Kegiatan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pekerja Sosial
2.	<i>Chage Agent System</i>	Pihak Kelurahan
3.	<i>Client System</i>	Masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti
4.	<i>Support System</i>	1. RT dan RW 2. Pihak Kelurahan

		3. Dinas Kesehatan
5.	<i>Contrilling System</i>	Dinas Ketenaga kerjaan
6.	<i>Implementing system</i>	1. RT dan RW 2. Pihak Kelurahan 3. Pemiliki usaha home industry 4. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
7.	<i>Target System</i>	MasyarakaT Kelurahan Kebon Jayanti
8.	<i>Action System</i>	Pekerja sosial, Dinas Kehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah pengembangan Masyarakat (*Community Organization*)/Pengembangan Organisasi (*Community Development*). CO/CD adalah salah satu metode yang digunakan dalam praktik pekerja sosial dengan fokus utama adalah level komunitas atau masyarakat lebih luas. CO/CD juga dimaksud untuk proses memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial ddengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyakat atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Teknik yang digunakan adalah Penyuluhan Sosial. Penyuluhan sosial peyuluhan sosial merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui edukasi, komunikasi, motivasi, dan penyebarluasan informasi oleh aktor penyuluh sosial baik secara lisan maupun tulisan atau peragaan kepada khalayak sasaran sehingga muncul pemahaman, pengetahuan dan kemampuan yang sama guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dubutuhkan

1. Rencana Anggaran

Pelaksanaan Program Sosialisasi Terkait Dampak dari Pemukiman Padat Bagi Kesehatan Masyarakat memerlukan anggaran dana untuk pelaksanaan program ini. maka dari dari berikut acuan dasar anggaran dana dalam program ini :

Tabel 18. Rencana Anggaran Kegiatan Profil Penataan Lingkungan

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Logistik					
1.	Benner Kegiatan Sosialisasi	1	Lembar	100.000,00	100.000,00
2.	ATK	4	Paket	50.000,00	200.000,00
Jumlah I					200.000,00
Honor					
1.	Dinas PUPR			1.600.000,00	1.600.000,00
2.	Dinas Kesehatan			1.600.000,00	1.600.000,00
Jumlah II					3.200.000,00
Konsumsi					
1.	Snack Panitia	7	Box	15.000,00	105.000,00
2.	Snack Tamu Undangan	2	Box	30.000,00	60.000,00
3.	Snack Peserta	35	Box	15.000,00	525.000,00
Jumlah III					690.000,00
Jumlah Keseluruhan					4.090.000,00

2. Alat Yang Dibutuhkan

- Computer/laptop
- Infocus
- Mikrofon
- Speker
- Meja
- Kursi
- Kertas plano
- Kertas HVS
- Alat tulis
- Taplak meja

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan sebuah teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*Strangth*) dan kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Theats*).

Tabel 19. Analisis SWOT Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

<p>Faktor Internal</p>	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi meningkat 2. Pemahaman informasi yang dapat diterima oleh peserta sosialisasi 	<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <p>Adanya kesulitan dalam menyamakan jadwal dengan sasaran program</p>
<p>Faktor Eksternal</p> <p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat 2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan aparat 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan program 2. Kombinasi antara materi narasumber dari dinas 	<p>Strategi WO</p> <p>Mengefisienkan waktu masyarakat yang tersedia untuk melaksanakan program</p>

kelurahan	kesehatan dan dinas PUPR	
Ancaman (<i>Treats</i>) Ada kemungkinan masyarakat tidak mengikuti kegiatan sosialisasi	Strategi ST 1. Menyediakan undian berhadiah agar menarik minat masyarakat 2. Penyajian materi dengan bahasa yang mudah dipahami	Strategi WT 1. Menggerakkan semua stakeholder yang terkait 2. Menyebarluaskan poster yang menarik di tempat yang sering dikunjungi masyarakat

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah dan pelaksanaan kegiatan bertujuan agar jalannya acara menjadi lancar dan berjalan dengan sistematis agar tercapainya tujuan program. Adapun langkah dan pelaksanaan kegiatan adalah :

1) Tahap Pra Kegiatan

- a. Membentuk panitia kerja dan melakukan rapat terkait pelaksanaan program yang meliputi konsep dari penyuluhan yang akan di adakan, menyusun jadwal kegiatan, dan menentukan narasumber yang akan menjadi pembicara.
- b. Menyusun proposal kegiatan
- c. Mengurus izin kegiatan dan menyebarkan undangan kepada narasumber serta peserta kegiatan

2) Tahap Pelaksanaan

Berikut susunan acara dalam program Sosialisasi Dampak Pemukiman Padat Bagi Kesehatan Masyarakat.

Tabel 20. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Analisis Penataan Lingkungan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
1.	09.00-09.30	Registrasi Peserta	Divisi Acara	Divisi Acara
2.	09.30-09.45	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3.	09.45-10.00	Sambutan Lurah	Lurah	Divisi Acara

4.	10.00-10.30	Pemaparan Materi terkait Pentingnya K3 dalam home industry	Pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Divisi Acara dan Humas
5.	10.30-10.45	Ice breaking	MC	Divisi acara
6.	10.45-11.10	Pemaparan materi terkait penerapan K3 dalam usaha home industry	Pihak Dinas Kesehatan	Divisi acara dan humas
7.	11.10-11.30	Sesi Tanya jawab	Pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan pihak Dinas Kesehatan	Divisi Acara dan Humas
8.	11.30-11.35	Dokumentasi	Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
9.	11.35-11.45	Penutup	MC	Divisi Acara

3) Tahap Pengakhiran

Evaluasi merupakan kegiatan atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegoatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan yang dilakukan.

Setelah melakukan evaluasi hal yang dilakukan selannjutnya pada tahapan pengakhiran adalah melakukan pelaporan dan menyusun lembar pertanggung jawaban dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan.

2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana

2.5.1 Gambaran Umum Masalah

Kecelakaan industri adalah kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja khususnya di lingkungan industri. Faktor yang paling utama timbulnya kecelakaan kerja adalah faktor peralatan teknis, lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri. Secara umum, terdapat dua golongan penyebab kecelakaan yaitu tindakan perbuatan lingkungan yang tidak

memenuhi keselamatan (*unsafe human act*) dan keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafecondition*).

Terdapat beberapa *Home Industry* yang ada di kelurahan Kebon Jayanti. Home industry ini bergerak di beberapa pabrik seperti pabrik keramik yang berada di RW, pabrik konveksi, pabrik pembuatan dompet, bengkel, bengkel bubut, dan mesin bubut dan *press*. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 21. Daftar usaha Home Industry di Kelurahan Kebon Jayanti

No.	Jenis Usaha	Alamat
1.	Pengrajin Antik Keramik (H.Oma Saputra)	RW 02
2.	Konveksi Pembuatan Pakaian Anak (Ibu Jamila)	RW 02
3.	Pembuatan Dompet	RW 02
4.	Konveksi	RW 04
5.	Pengusaha Oncom	RW 04
6.	Bengkel Spare-Parts Motor	RW 04
7.	Konveksi Kain	RW 06
8.	Konveksi	RW 07
9.	Bengkel	RW 07
10.	Pengusaha Tempe	RW 08
11.	Bengkel Bubut	RW 08
12.	Konveksi Kerudung	RW 09
13.	Konveksi Kaos	RW 09
14.	Mesin Bubut dan Press	RW 12

Sumber : Hasil wawancara dan observasi Mahasiswa Praktikum 1 STKS Bandung Tahun 2018

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan industri adalah tidak adanya penerapan K3 dalam pabrik-pabrik yang memproduksi beberapa barang di Kelurahan Kebon Jayanti. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan masih terdapat beberapa usaha Home Industry masih belum menerapkan K3 dalam pabriknya. Beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh praktikan yang menjadi faktor penyebab para pemilik usaha belum menerapkan K3 dalam usahanya hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemilik usaha terkait apa itu K3 dan masih rendahnya kesadaran diri pemilik usaha untuk melindungi tempat usahanya dan pekerjanya.

2.5.2 Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan yang dipilih

a) Konsep Bencana

1. Pengertian Bencana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Klasifikasi Bencana

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007, bencana dapat digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu :

- 1) Bencana Alam, suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, angin topan, kebakaran liar, dan lain sebagainya
- 2) Bencana non-Alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-Alam seperti wabah penyakit, epidemic, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan lain sebagainya.
- 3) Bencana alam ekstra-terrestrial Bencana alam ekstraterrestrial adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa, contohnya hantaman/impact meteor. Bila hantaman benda benada langit mengenai permukaan bumi maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi.

b) Konsep Industri

1. Pengertian Industri

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Menurut Sadono Sukirno, industri pada hakikatnya berarti perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Kegiatan seperti itu antara lain ialah pabrik tekstil, pabrik perakitan atau pembuat mobil dan pabrik pembuat minuman ringan. Hasil industri tidak hanya berupa

barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Jasa industry tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Jasa industry adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa industri adalah sebuah kegiatan ekonomi yang memproduksi barang menggunakan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah mesin dan alat alat penghasil produk lainnya. Selain itu kegiatan industri juga berkaitan dengan kegiatan manusai untuk menghasilkan barang untuk meningkatkan perekonomiannya.

2. Klasifikasi Industri

Beberapa referensi tentang perindustrian mengklasifikasikan industry berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, produksi yang dihasilkan, dan barang yang dihasilkan

a. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku

Setiap industry membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan bahan baku yang digunakan dibedakan menjadi 3, yaitu ;

1. Industry ekstratif yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya : industri hasil pertanian, industri hasil perikanan dan industri hasil kehutanan.
2. Industry nonekstratif yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil dari industri lain. Misalnya ; industri kayu lapis dan industri kain.
3. Industry fasilitatif yaitu kegoatan industrinya dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya : perdangan, perbankan, angkutan dan pariwisata.

b. Klasifikasi Industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibedakan menjadi 4, yaitu :

- 1) Industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepada rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya ; industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.
- 2) Industri kecil yaitu industry yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. Ciri industri kecl adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya : industri batubara, industri genteng dan industri pengolahan rotan.

- 3) Industri besar yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya : industri mobil, industri pesawat terbang dan industri tekstil.

c. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dibedakan menjadi 3 yaitu ;

- 1) Industri primer yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung misalnya : industri makanan dan minuman, industri anyaman.
- 2) Industri sekunder yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Misalnya : industri baja dan industri tekstil.
- 3) Industri tersier yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. misalnya : industri perbankan, industri perdagangan dan industri pariwisata.

d. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Misalnya industri mesin dan industri percetakan
- 2) Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Misalnya : industri obat-obatan, industri makanan dan industri minuman.

c) **Konsep *Home Industry***

1. Pengertian *Home Industry*

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. selain itu dalam pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) biasanya mencakup setidaknya dua aspek yaitu aspek nilai intervensi awal jumlah asset dan aspek jumlah tenaga. Menurut BPS jumlah tenaga kerjanya dia natarnya : industri rumah tangga (*Home Industry*) tenaga kerjanya 5-9 orang, industri kecil tenaga kerjanya terdiri

dari 10-19 orang, industri menengah tenaga kerjanya berjumlah 20-99 orang, industri besar tenaga kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih.

2. Macam-macam *Home Industry*

Pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). Bahwasanya, industri

- 1) Industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dan kelompok kimia dasar. Yang termasuk dalam industri mesin dan logam dasar industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya.
- 2) Industri kecil yang meliputi industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan industri kerta, percetakan, pembibitan, barang-barang karet, plastik, dan lain-lain).
- 3) Industri hilir yang kelompok aneka industri yang meliputi antara lain industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah hasil sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok aneka industri ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.

d) Konsep K3

1. Pengertian K3

Ditinjau dari keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun. 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa tujuan Kesehatan Keselamatan Kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan apabila kesehatan pegawai buruk mengakibatkan sangat penting meningkat apabila kesehatan pegawai buruk mengakibatkan turunnya capaian/output serta demotivikasi kerja.

- a) Keselamatan (*Safety*) keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerjaan: menjaga keselamatan orang lain : melindungi peralatan, tempat dan melancarkan proses produksi.
- b) Kesehatan (*Health*) kesehatan diartikan sebagai derajat/tingkat keadaan fisik dan psikologi individu (*the degree of physiological and psychological well being of the individual*). Secara umum, pengertian

dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

2. Tujuan Penerapan K3

Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 keselamatan kerja yaitu antara lain :

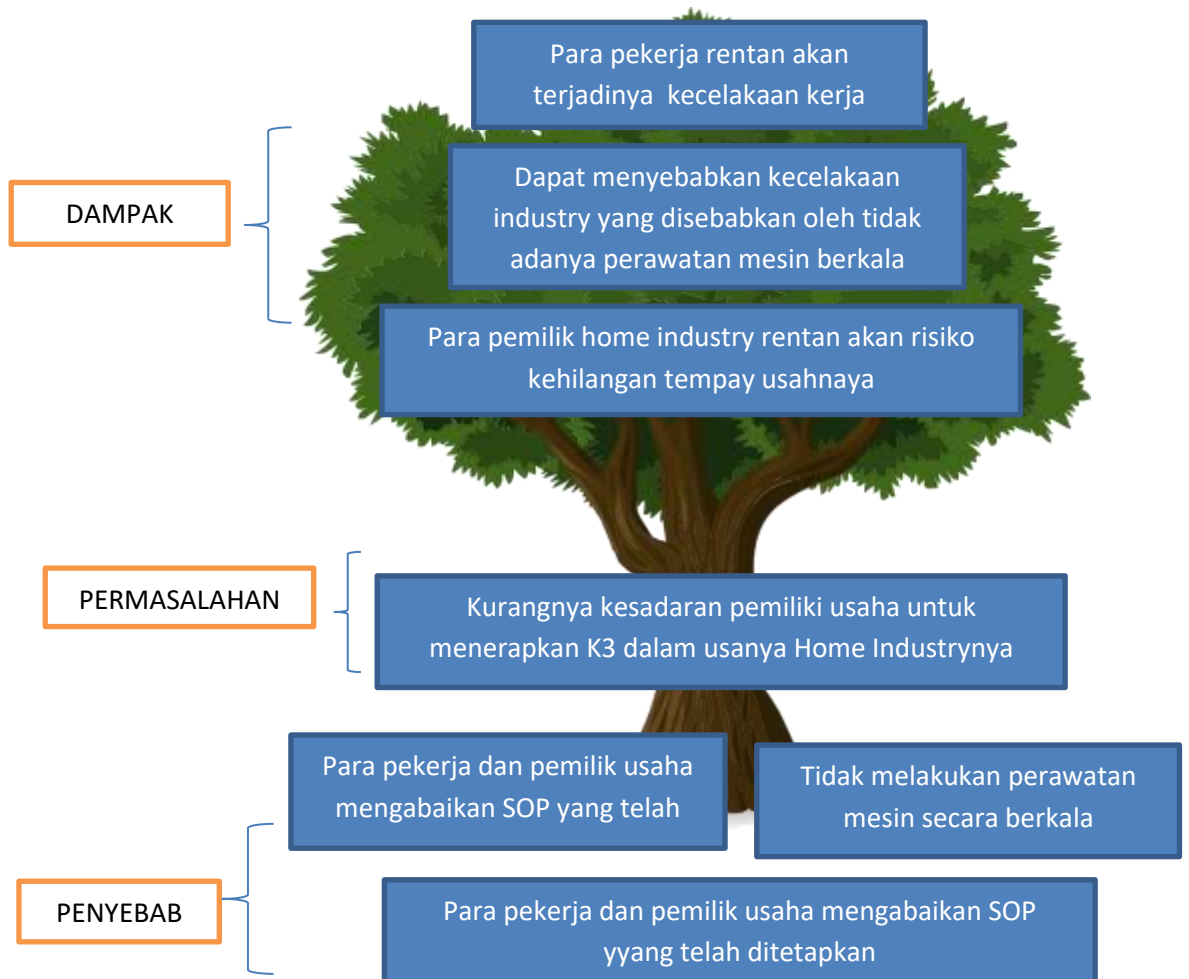
- 1) Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang di tempat kerja
- 2) Menjamin setiap sumber dapat digunakan secara aman dan efisien
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional

2.5.3 Asesmen

Dalam proses praktikum yang dilakukan di Kelurahan Kebon Jayanti untuk Profil Analis Penanggulangan Bencana praktikan menggunakan teknik Wawancara dan Home Visit. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kasi Kesos dan Bapak Lurah, praktikan memperoleh isu masalah terkait potensi-potensi terjadinya bencana non alam salah satunya adalah kecelakaan industry. dalam home yang dilakukan, praktikan memperoleh informasi terkait tidak adanya penerapan K3 dalam usaha Home Industri yang ada di kelurahan Kebon Jayanti dimana tidak adanya penerapan K3 ini dapat menyebabkan bencana non alam yaitu kecelakaan industri.

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan para pemilik usaha Home Industry di Kelurahan Kebon Jayanti ditemukan masalah terkait tidak adanya penerapan K3 dalam usaha *Home Industry* di Kelurahan Kebon Jayanti. Penerapan K3 dalam usaha sangat penting dilihat dari banyak dampak yang disebabkan oleh tidak adanya penerapan K3 dalam usaha industri. dalam peraturan pemerintah telah dijelaskan bahwa setiap usaha industri atau *home industry* wajib menerapkan K3 untuk keselamatan para pekerja dan untuk menghindari kecelakaan industri yang akan menimbulkan korban jiwa dan korban materi. Dilihat dari kondisi pemukiman yang padat dan usaha *home industry* beberapa usaha *home industry* yang belum menerapkan K3 maka menjadikan kawasan-kawasan yang berdekatan dengan lokasi pabrik-pabrik usaha milik risiko terjadinya bencana non alam yaitu kecelakaan industry. Oleh sebab itu masalah ini dianggap memerlukan penanganan segera agar menghindari masyarakat sekitar, para pekerja, dan para pelaku usaha Home Industry terhindar dari risiko-risiko bencana non alam ini.



Gambar 5. Pohon Masalah Analisis Penanggulangan Bencana

a) Penyebab Masalah

- a. Tidak menerapkan K3 dalam usaha *Home Industry*
Terdapat beberapa usaha *Home Industry* belum menerapkan K3 dalam usahanya. Pentingnya penerapan K3 dalam usaha industri ini dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan-kecelakaan kerja dan kecelakaan industri. Selain itu penerapan K3 dalam usaha *Home Industry* juga dapat upaya pencegahan terjadinya kecelakaan industri
- b. Tidak melakukan perawatan mesin secara berkala.
Perawatan mesin harusnya dilakukan secara berkala hal ini dapat mencegah terjadinya risiko-risiko kecelakaan industri. Perawatan mesin secara berkala juga dapat menjamin keselamatan para pekerja dan pemilik usaha.
- c. Para pekerja dan pemilik usaha mengabaikan SOP yang telah ditetapkan .Penerapan Standar Operasional Prosedur sangat untuk

menjamin keselamatan para pekerja dan pemilik usaha. SOP ini juga merupakan salah satu prosedur penting dalam penerapan usaha industri baik industri kecil, sedang, maupun industri besar.

b) Dampak Masalah

- a. Para pekerja rentan akan terjadinya kecelakaan kerja.
Industri-industri yang tidak menerapkan K3 dalam usahanya dapat menyebabkan para pekerjanya rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.
- b. Dapat menyebabkan kecelakaan industri
Kecelakaan industri dapat disebabkan oleh tidak adanya perawatan mesin secara berkala. Maka dari itu pentingnya perawatan mesin secara berkala untuk menghindari risiko kecelakaan kerja.
- c. Para pemilik usaha *home industry* rentan akan risiko kehilangan tempat usahanya.

c) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Kemajuan industri di Indonesia saat ini semakin maju dan kemajuan tersebut belum diimbangi dengan perhatian terhadap pemahaman dan penyelesaian keselamatan kerja secara tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang biasanya terjadi di lingkungan kerja. Kawasan Kelurahan Kebon Jayanti memiliki usaha *home industry* yang bergerak di bidang pengrajin keramik, konveksi, pembuatan dompet, bengkel Spare Parts Motor, bengkel, dan bengkel bubut dimana secara keseluruhan dapat dijumlahkan sebanyak 17 usaha *home Industry* yang ada data ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi Mahasiswa STKS di tahun 2018. Setelah melakukan wawancara dengan pemilik usaha Home Industri dan pekerja home industri masih terdapat beberapa home industri yang belum menerapkan K3 dalam usaha *home industry* nya.

2. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah yang telah disnutkan maka dapat ditentukan beberapa identifikasi kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagai berikut ;

1. Sosialisasi terkait pentingnya K3 dalam usaha *home industry*
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan K3 dalam usaha *home industry*

3. Identifikasi Potensi dan Sumber

Identifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan yaitu :

a) Tokoh masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam menangani masalah ini sangat penting hal ini dikarenakan masyarakat dapat berperan sebagai pendukung jalannya pelaksanaan program yang akan dilakukan.

b) Perusahaan PINDAD

Berdasarkan website resmi PT PINDAD, PT PINDAD merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan K3 dalam pelaksanaan industrinya. PT PINDAD dapat dimanfaatkan sebagai pemberi sosialisasi tentang pentingnya K3 dalam usaha industry baik itu industry kecil atau industry besar. Selain itu PT PINDAD juga berperan sebagai *agen of Change* untuk mengubah pemikiran masyarakat terkait pentingnya K3.

c) Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Ketenaga Kerjaan dan perindustrian mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bisang perindustrian dan tugas pembantuan. Dinas Ketenaga Kerjaan dapat memberikan pemahaman masyarakat terkait K3 dalam usaha perindustrian.

d) Aparat Kelurahan

Aparat desa dalam permasalahan ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penyuluhan sosial sekaligus sebagai sistem sumber pendukung untuk program yang akan direncanakan.

2.5.4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang Intervensi

Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, begitu pula dengan bencana non alam seperti Kecelakaan Industri. Kecelakaan industri ini merupakan masalah yang terjadi apabila tidak adanya pemahaman dan kesadaran pemiliki usaha terkait pentingnya keselamatan kerja bagi para pekerja dan tempat usahanya. Keselamat para pekerja dan tempat industri ini sering kali menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan khususnya dalam usaha-usaha *home industry*. Namun, pada kenyataannya banyak kecelakaan industri terjadi dikarenakan tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan industri ini juga cukup besar. Dilihat dari kondisi pemukiman masyarakat Kelurahan Kebon Jayanti dapat dikatakan padat pemukiman hal ini juga menjadikan dampak yang ditimbulkan jika suatu ketika terjadi kecelakaan industri cukup berdampak besar.

Terdapat beberapa sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu Dinas Ketenaga Kerjaan, Tokoh masyarakat

itu sendiri, aparat kelurahan , dan perusahaan PINDAD yang berada di Kelurahan Kebon Jayanti.

b. Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Tujuan umum dari program Sosialisasi Pentingnya K3 Dalam Usaha *Home Industry* di Kelurahan Kebon Jayanti adalah untuk meningkatkan pemahaman pemilik usaha *Home Industry* tentang pentingnya K3 dalam usaha *home industry*.

Tujuan Khusus

1. Pemilik usaha memiliki pengetahuan terkait pentingnya K3 dalam usaha *home industry*
2. Pemilik usaha mampu menerapkan K3 dalam usahanya
3. Meningkatnya kesadaran pekerja terkait dalam menerapkan SOP kerja yang telah ditetapkan

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Bentuk kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan usaha *home industry* yang tidak menerapkan K3 dalam usahanya yaitu :

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan K3 dalam usaha industrinya. Dalam sosialisasi ini akan memberikan edukasi terkait penerapan K3 dalam usaha *home industry*.

2. Motitoring

Monitoring adalah proses rutin untuk melihat kemajuan dari sosialisasi yang dilakukan. Monitoring bertujuan untuk menjaga agar imolemestasi program sesuai dengan tujuan yang ada dalam program sosialisasi yang akan dilakukan.

Tabel 22. Bentuk Kegiatan Profil Analis Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Indikator Keberhasilan
Sosialisasi Pentingnya K3 Dalam Usaha <i>Home Industry</i>	Pemilik Usaha Home Industri dan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat	1. Perusahaan PINDAD 2. Dinas Ketenaga Kerjaan	Lurah Kelurahan Kebon Jayanti	1 hari	Peningkatan kesedaran pemiliki usaha terkait pentingnya penerapan K3

	Kelurahan Kebon Jayanti	terkait pentingnya K3 dalam usaha <i>Home Industry</i>				dalam usaha <i>home industry</i>
--	-------------------------	--	--	--	--	----------------------------------

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat pihak-pihak terkait dalam program Sosialisasi yang akan dilakukan. Dalam sistem partisipasi ini terdiri dari *inisiator system*, *chage agent system*, *support system*, *controlling system*, *implementing system*, *target system*, dan *asction system*. Berikut tabel yang dapat dilihat dari system partisipasi :

Tabel 23. Sistem Partisipasi Program Analis Penanggulangan Bencana

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pekerja Sosial
2.	<i>Chage Agent System</i>	Pihak Kelurahan
3.	<i>Client System</i>	Pemilik usaha <i>home industry</i> dan warga Kelurahan Kebon Jayanti
4.	<i>Support System</i>	1. RT dan RW 2. Pihak Kelurahan 3. Perusahaan PINDAD
5.	<i>Contrilling System</i>	Dinas Ketenaga kerjaan
6.	<i>Implementing system</i>	1. RT dan RW 2. Pihak Kelurahan 3. Pemiliki usaha home industry
7.	<i>Target System</i>	Pemilik usaha <i>home industry</i> dan warga setempat
8.	<i>Action System</i>	Pekerja sosial, perusahaan PINDAD, dan Dinas Ketenaga kerjaan

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah pengembangan Masyarakat

(*Community Development*)/Pengembangan Organisasi (*Community Organiation*). CO/CD adalah salah satu metode yang digunakan dalam praktik pekerja sosial dengan fokus utama adalah level komunitas atau masyarakat lebih luas. CO/CD juga dimaksud untuk proses memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial ddengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyakat atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Teknik yang digunakan sebagai berikut :

1) Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial peyuluhan sosial merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui edukasi, komunikasi, motivasi, dan penyebarluasan informasi oleh aktor penyuluh sosial baik secara lisan maupun tulisan atau peragaan kepada khalayak sasaran sehingga muncul pemahaman, pengetahuan dan kemampuan yang sama guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dubutuhkan

1. Rencana Anggaran

Dalam pelaksanaan Program Sosialisasi Pentingnya K3 Dalam Usaha *Home Industry* memerlukan anggaran dana dalam melaksanakan programnya. Maka dari itu berikut acuan dasar anggaran dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini :

Tabel 24. Rencana Anggaran Program Profil Analisis Penanggulangan Bencana

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Logistik					
1.	Benner Kegiatan Sosialisasi	1	Lembar	100.000,00	100.000,00
2.	ATK	5	Paket	10.000,00	50.000,000
Jumlah 1					150.000,00
Honor					
1.	Perusahaan PINDAD			1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Dinas Ketenaga Kerjaan			1.600.000,00	1.600.000,00
Jumlah II					3.100.000,00

Konsumsi					
1.	Snack Panitia	7	Box	15.000,00	105.000,00
2.	Snack Tamu Undangan	2	Box	30.000,00	60.000,00
3.	Snack Peserta	40	Box	15.000,00	600.000,00
Jumlah III					765.000,00
Jumlah Keseluruhan					4.015.000,00

2. Alat yang dibutuhkan

- Computer/laptop
- Infocus
- Mikrofon
- Speker
- Meja
- Kursi
- Kertas plano
- Kertas HVS
- Alat tulis
- Taplak meja

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT merupakan sebuah teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*Strangth*) dan kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*), dan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Theats*).

Tabel 25. Analisis SWOT Profil Analis Penanggulangan Bencana

Aspek SWOT	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	1. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya K3 dalam usaha Home Industry	1. Kurangnya partisipasi masyarakat terkait kegiatan sosialisasi

	<p>2. Adanya kerjasama antara seluruh pihak terkait pelaksanaan program yang akan dilakukan</p>	
<p>Peluang (Opportunity)</p> <p>1. Adanya dukungan dari pemerintah untuk menerapkan K3 dalam usaha home industry</p> <p>2. Adanya dukungan perusahaan sekitar Kelurahan Kebon Jalan penerapan K3 dalam usaha home industry</p>	<p>Strategi SO</p> <p>Merencanakan program dan kerjasama dengan para stakeholder yang terkait</p>	<p>Strategi WO</p> <p>merencanakan program sosialisasi yang terencana dan menentukan sasaran yang tepat</p>
<p>Ancaman (Treats)</p> <p>Adanya kemungkinan masyarakat tidak menghadiri sosialisasi</p>	<p>Strategi ST</p> <p>Mengadakan undian hadiah bagi peserta yang hadir</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Merancang kegiatan semenarik mungkin dan setelah melakukan sosialisasi penyebarluasan informasi secara lebih menarik</p>

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Langkah dan pelaksanaan kegiatan bertujuan agar jalannya acara menjadi lancar dan berjalan dengan sistematis agar tercapainya tujuan program. Adapun langkah dan pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Tahap pra kegiatan
 - a. Membentuk panitia kerja dan melakukan rapat terkait pelaksanaan program yang meliputi konsep dari penyuluhan yang akan di adakan, menyusun jadwal kegiatan, dan menentukan narasumber yang akan menjadi pembicara.
 - b. Menyusun proposal kegiatan
 - c. Mengurus izin kegiatan dan menyebarkan undangan kepada narasumber serta peserta kegiatan
2. Tahap pelaksanaan

Berikut susunan acara dalam Program Sosialisasi Pentingnya K3 dalam usaha *Home Industry* yaitu :

Tabel 26. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Ptofil Penanggulangan Bencana

No.	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
1.	09.00-09.30	Registrasi Peserta	Divisi Acara	Divisi Acara
2.	09.30-09.45	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3.	09.45-10.00	Sambutan Lurah	Lurah	Divisi Acara
4.	10.00-10.30	Pemaparan Materi terkait Pentingnya K3 dalam home industry	Pihak Dinas Ketenaga Kerjaan	Divisi Acara dan Humas
5.	10.30-10.45	Ice breaking	MC	Divisi acara
6.	10.45-11.10	Pemaparan materi terkait penerapan K3 dalam usaha home industry	Perusahaan PINDAD	Divisi acara dan humas
7.	11.10-11.30	Sesi Tanya jawab	Pihak Dinas Ketenaga kerjaandan Perusahaan PINDAD	Divisi Aacara dan Humas
8.	11.30-11.35	Dokumentasi	Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
9.	11.35-11.45	Penutup	MC	Divisi Acara

3. Tahap Pengakhiran

Evaluasi merupakan kegiatan atau peninjauan kembali antara proses dengan hasil yang telah dicapai dari kegoatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang dilakukan diakhir kegiatan. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan yang dilakukan.

Setelah melakukan evaluasi hal yang dilakukan selanjutnya pada tahapan pengakhiran adalah melakukan pelaporan dan menyusun lembar pertanggung jawaban dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Kegiatan praktikum Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial praktikan dilakukan dengan mengikuti proses yang telah terlaksana yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Dari kegiatan praktikum ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktek dengan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan secara langsung selama berada di lokasi praktikum Kelurahan Kebon Jayanti. Pengumpulan data tersebut praktikan lakukan saat mencari data dan informasi mengenai isu-isu profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Proses kegiatan Praktikum Laboratorium secara garis besar berhasil menambah wawasan bagi praktikan, karena ketika proses praktikum berlangsung para praktikan mengikuti kegiatan bekal dari masing-masing narasumber sehingga meningkatkan pengetahuan dan jendela cakrawala praktikan mengenai kondisi sosial masyarakat secara nyata dan pengetahuan mengenai kelima profil analisis. Melalui adanya kegiatan praktikum ini tentu mampu memberikan motivasi lebih bagi praktikan dalam menghadapi tantangan dunia kerja kedepannya.

Berikut hasil analisis praktikan terhadap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial :

1. Analisis Jaminan Sosial

Dalam profil analisis jaminan sosial, praktikan mengambil isu jaminan kesehatan nasional terkait mekanisme pelaksanaan program mobile JKN di Kelurahan Kebon Jayanti. Permasalahan ini disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan Mobile JKN dalam hal pendaftaran, informasi status kepesertaan, dan informasi faskes yang dapat diakses, penyebab lain berupa kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait penggunaan fitur-fitur yang ada dalam Mobile JKN. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses aplikasi Mobile JKN. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan penerima manfaat JKN tentang aplikasi yang dapat membantu dalam akses informasi JKN, berdampak juga pada tidak dapat memanfaatkan aplikasi yang seharusnya dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu berdampak juga pada saat sakit masyarakat kesulitan mengetahui fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat. Untuk upaya penyelesaian masalah ini praktikan merekomendasikan program peningkatan pemahaman masyarakat terkait aplikasi Mobile JKN.

2. Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam profil analisis sumber dana bantuan sosial, praktikan mengambil isu terkait pelaksanaan program PKH masalah terkait sulitnya melakukan graduasi mandiri terhadap KPM yang sudah mampu. Penyebab masalah ini adalah keterikatan KPM terhadap bansos yang diberikan, kurangnya pemahaman penerima manfaat terkait konsep dari bansos dan mekanisme pelaksanaan PKH, dan kurangnya kesadaran diri penerima manfaat terkait peningkatan perekonomian penerima manfaat. Berdasarkan penyebab masalah yang telah dijelaskan maka dampak dari penyebab masalah ini adalah menjadikan penerima manfaat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terhambatnya target dari pendampingan PKH yaitu setiap pendampingan PKH yaitu setiap pendampingan harus menggraduasi 10% dari jumlah dampingan, dan menghambat salah satu tujuan dari program PKH yaitu memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Untuk upaya penyelesaian masalah ini praktikan merekomendasikan program peningkatan pemahaman KPM terkait konsep bantuan sosial PKH dan meningkatkan kesadaran diri KPM untuk melakukan graduasi.

3. Analisis Pemberdayaan Sosial

Dalam profil analisis pemberdayaan sosial praktikan mengambil isu terkait pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi fakir miskin. Penyebab masalah ini adalah minimnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, sikap masyarakat yang malas bekerja dan hanya menunggu bantuan sosial dari pemerintah, dan kurangnya keahlian dan kemampuan masyarakat dalam melihat peluang-peluang usaha yang ada. Dampak dari penyebab masalah yang dijelaskan di atas adalah meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan terakhir, ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan pemerintah, dan rendahnya pendapatan masyarakat. upaya penyelesaian masalah ini praktikan merekomendasikan program peningkatan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan sosial.

4. Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Dalam profil penataan lingkungan sosial praktikan mengambil isu masalah terkait pemukiman padat. Penyebab dari masalah ini adalah urbanisasi yang meningkat, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat sekitar yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu mendirikan rumah di kawasan yang tidak padat pemukiman. Berdasarkan penyebab yang telah dijelaskan di atas maka dampaknya adalah meningkatnya angka pertumbuhan dan mitigasi di wilayah Kebon Jayanti, menimbulkan pemukiman padat dan kumuh, dan menurunnya tingkat kesehatan di kawasan yang padat permukiman dan asnya

keterbatasan dalam pemanfaatan fasilitas umum yang ada. Upaya penyelesaian masalah ini praktikan merekomendasikan program sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat.

5. Analisis Penanggulangan Bencana

Dalam profil penanggulangan bencana praktikan mengambil isu masalah mengenai bencana non alam yaitu kecelakaan industri yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran pemilik usaha terkait penerapan K3 dalam usaha *Home industrynya*. Penyebab dari masalah ini adalah tidak menerapkan K3 dalam usaha *home industry*, tidak melakukan perawatan mesin secara berkala, para pekerjaan dan pemilik usaha mengabaikan SOP yang telah ditetapkan. Berdasarkan penyebab masalah yang telah dijelaskan di atas maka ditemukan dampak masalah yaitu para pekerja rentan akan terjadinya kecelakaan kerja, dapat menyebabkan kecelakaan industri, dan para pekerja berisiko terjadi secara berkala. Upaya penyelesaian masalah ini praktikan merekomendasikan program sosialisasi terkait pentingnya K3 dalam usaha *home industry*.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah dilakukan oleh praktikan terkait kelima profil analisis yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan mengajukan beberapa rekomendasi yang diajukan kepada :

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
 - Diharapkan kedepannya prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial mampu mempertimbangkan kembali terkait tempat praktikum agar tidak jauh dengan lokasi kampus, selain itu diharapkan prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial mempertimbangkan kembali terkait tempat tinggal saat praktikan berada di lokasi praktikum
 - Diharapkan kedepannya prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial mempertimbangkan kembali biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan praktikum seperti penyediaan tempat tinggal.
 - Diharapkan kedepannya prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial memberikan waktu lebih panjang untuk mencari isu masalah dan menyusun laporan praktikum hal ini dikarenakan praktikan tidak hanya mengerjakan tugas praktikum saja namun juga tugas dari matakuliah wajib dan kajian.
 - Diharapkan para tim dosen dapat menyesuaikan waktu apabila memberikan kelas pengganti dikarenakan terkadang mahasiswa juga memiliki kegiatan yang harus dilakukan di tempat praktikum.

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial

Diharapkan dapat memperhatikan kembali terkait mekanisme perizinan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brager, G., Specht., & Torczyne, J. (1987) . Community Organization. *Columbia University Press*
- BPJS. (2020). Jaminan Sosial : Pengertian, Jenis, dan Contohnya Di Indonesia. <https://lifepal.co.id/media/jaminan-sosial/>
- Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan.(2015). Kajian Program Keluarga Harapan. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/cf871a82-6692-4206-93a0-9f88a66c5756#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20PKH%20ini,kesejahteraan%20dari%20kelompok%20paling%20miskin>
- Kementerian Sosial Indonesia. (2020). Program Keluarga Harapan (PKH). <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh#:~:text=Program%20Keluarga%20Harapan%20yang%20selanjutnya,Pemerintah%20Indonesia%20telah%20melaksanakan%20PKH>
- Hekam Mohammad dkk. (2021). Pemberdayaan Pengrajin Daun Pandan di Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Ilmi Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*
- Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial RI tentang Penyaluran Bantuan Nontunai*. Permensos RI Nomor 11 Tahun 2018
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. UU No 13 Tahun 2011
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan*. UU No 24 Tahun 2007
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian*. UU RI Nomor 5 Tahun 1984
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil*. UU RI Nomor 9 Tahun 1995
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerdja*. UU No 1 Tahun 1970

PKH Jepara. (2021). Tujuan dan Jenis Graduasi.
<https://www.pkhjepara.com/jenis-graduasi/>

Tambakromo Sitirejo. (2022). Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013.
<https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>

C. LAMPIRAN I



**Kamis 26 Januari 2023
Bimbingan Pertama**



**Jumat 27 Januari 2023
Penjajagan Awal**



**Rabu 8 Februari 2023
Serah Terima Mahasiswa
Praktikum**



**8 Februari 2023
Anjongsana RW 14**



Jumat 10 Februari 2023
Kegiatan Community Meeting



Jumat 10 Februari 2023
Kegiatan Community Meeting



Senin 13 februari 2023
Bimbingan untuk Bersama Dosen



24 Februari 2023
wawancara terkait PKH



1 Maret 2023
Kegiatan P2K2



7 Maret 2023
Bimbingan Bersama Dosen Pembimbing



Kamis 9 Maret
Wawancara Bersama warga



Jumat 3 April
Supervisi 1



Jumat 14 April 2023
Lokakarya



Hasil Transect Walk